



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



DJPb  
Indonesian Treasury

# FKPKN TRIWULAN III

TAHUN 2023

## KANWIL DJPB PROVINSI JAMBI

(0741) - 668802

kanwil.jambi@gmail.com

djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jambi

Jl. M. Yoesoef Singadikane No. 45,  
Telanaipura, Kota Jambi, 36122



# KATA PENGANTAR



## BURHANI AS

Kepala Kantor Wilayah  
DJPb Provinsi Jambi

Jambi, 11 Oktober 2023

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Burhani AS

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan mengucapkan puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dapat menyusun Laporan kegiatan Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara (FKPKN) secara tepat waktu.

Laporan kegiatan FKPKN ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan III tahun 2023 dalam rangka memenuhi tugas Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai *Treasury, Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor*.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kontribusi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini terutama kepada Satuan Kerja mitra Kanwil DJPb, Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jambi dan unit eselon I Kementerian Keuangan Provinsi Jambi.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi sarana untuk menyediakan informasi kegiatan-kegiatan terkait fiskal dan keuangan pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah, serta mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik.

### **Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**



# TIM PENYUSUN



## **PENGARAH**

Burhani AS

## **KETUA**

Fauzi Syafriel

## **PENYUSUN**

Istiqomah Handayani

Rr. Raina Avissa Dione

Belindasari

# DAFTAR ISI



i	Kata Pengantar
ii	Tim Penyusun
iii	Daftar Isi
iv	Executive Summary
1	Latar Belakang
2	Identifikasi Masalah
4	Pelaksanaan Kegiatan Periodik
26	Pelaksanaan Kegiatan Strategis/Tematik
41	Pelaksanaan Kegiatan Local Expert
45	Kesimpulan dan Rekomendasi

# EXECUTIVE SUMMARY

Kanwil DJPb Provinsi Jambi melalui Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) tingkat daerah secara aktif berkolaborasi dan bersinergi baik dengan Kemenkeu Satu, berbagai tim/forum daerah, pimpinan pemerintah daerah, dan *local expert* melaksanakan berbagai kegiatan untuk memberikan pembinaan, pendampingan, serta arahan dan rekomendasi sebagai wujud peran Kanwil DJPb dalam membantu penyelesaian berbagai isu/permasalahan perekonomian dan fiskal di daerah. Berbagai kegiatan dilaksanakan sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran serta memastikan pembangunan yang dilaksanakan dapat bermanfaat terhadap masyarakat.

Selama periode triwulan III tahun 2023, Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah melaksanakan sebanyak 13 kegiatan periodik, 9 kegiatan strategis/tematik yang terdiri atas 6 kegiatan strategis dan 3 kegiatan tematik, serta 2 kegiatan yang melibatkan *local expert* dengan rincian sebagai berikut.

## 1. Kegiatan Periodik

Kegiatan rutin yang dilaksanakan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Jambi maupun unit vertikal yang telah dilaksanakan diantaranya Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan Ii 2023 Satker KPU Provinsi Jambi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II 2023 Satker BKSDA Jambi (238521) dan SNVT PJPA Sumatera VI (498067), *Focus Group Discussion* Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Koordinasi Pelaksanaan Sosialisasi Perluasan Cakupan Pembiayaan UMKM melalui Penambahan Calon Penyalur Pembiayaan UMi di Dinas KUKM Kab. Batanghari dan Muaro Jambi, *One On One Meeting* Pengendalian Inflasi Lingkup Provinsi Jambi, Kegiatan Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Sosialisasi Penyaluran Pembiayaan UMi Kepada Koperasi di Kota Jambi Dan Kabupaten Muara Bungo, dan Rangkaian Rapat ALCo Regional baik Teknis, *Deputies*, dan Komite.

## 2. Kegiatan Strategis/Tematik

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai upaya untuk menunjang bahasan tematik Kajian Fiskal Regional dan ALCo Regional diantaranya FGD Implementasi Program *Biocarbon Fund* dalam Kerangka Penguatan Tata Kelola Dana Perubahan Iklim Di Provinsi Jambi, Pengayaan Materi Lomba Bedah Data APBD 2023,



dan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Pertukaran Data dengan Pemkab Bungo. Sementara itu, kegiatan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan keterlibatan berbagai tim atau forum daerah diantaranya Rilis Bersama Perekonomian Provinsi Jambi Triwulan II 2023, Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto Indikator Sosial Ekonomi Se-Sumatera Tahun 2023, *Workshop* Koordinasi Eksplorasi dan Penyediaan Data Untuk *Rebasing* PDRB Berbasis CVM Provinsi Jambi Tahun 2023, Fgd Percepatan Proses Fase Insentif Berbasis Kinerja Program BioCF ISFL Provinsi Jambi, Seminar Nasional Pengurangan Emisi GRK dan Peluang Perdagangan Karbon di Indonesia, dan Sosialisasi Kegiatan Program CLUA for *Social Forestry* di Wilayah Jambi.

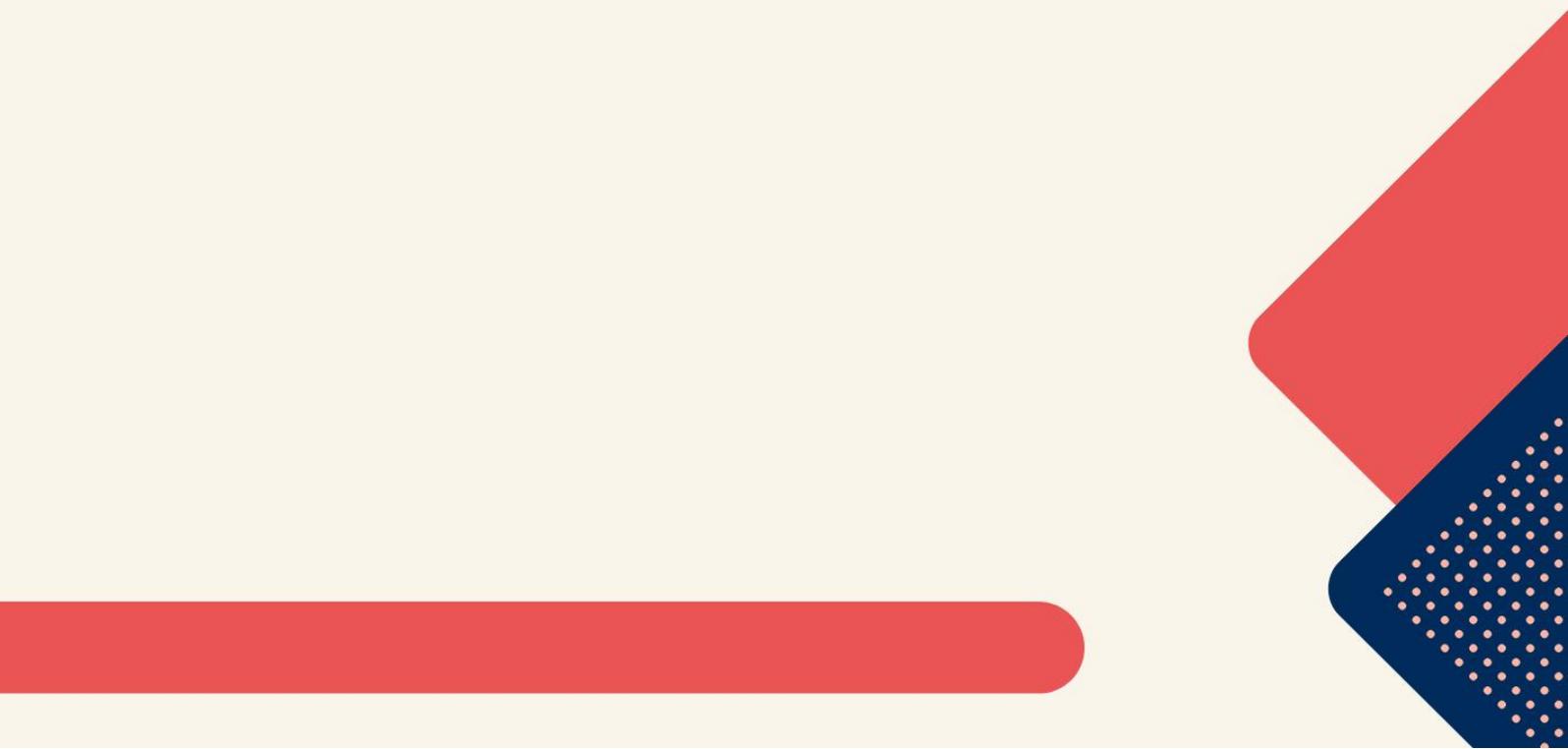
### **3. Kegiatan *Local Expert***

Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan yang melibatkan *local expert* Provinsi Jambi berupa Rapat Komite ALCo Regional Jambi Realisasi sampai dengan Juni 2023 dan *Sharing Session* Analisis Ketimpangan Fiskal (Horizontal dan Vertikal) di Provinsi Jambi bersama *Local Expert*.



# LATAR BELAKANG

**FKPKN TRIWULAN III TAHUN 2023**



## LATAR BELAKANG

Tahun 2023, merupakan tahun keempat sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, ekonomi global dihadapkan pada tantangan baru yang tidak kalah serius. Kekhawatiran akan resesi merebak seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, meroketnya inflasi di berbagai negara, dan peningkatan suku bunga global. Padahal, sampai dengan tahun 2023 ini luka-luka pandemi belum sepenuhnya dapat disembuhkan. Faktanya, tingkat pengangguran masih relatif tinggi dan tingkat pendapatan usaha masih menurun di sejumlah sektor. Bahkan sejumlah negara masih rentan dilanda krisis pangan dan energi.

Tahun ini penuh tantangan dalam mengelola keuangan negara karena masih dibayangi oleh isu pandemi COVID-19 dan isu geopolitik serta menjadi tahun dimana batas maksimal defisit anggaran kembali ke angka 3%. Untuk menghadapi hal tersebut, pengelolaan keuangan negara harus tetap terjaga, sehingga dapat meminimalisasi risiko yang dihadapi dan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, terkait penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD), seluruh elemennya pada tahun ini disalurkan melalui KPPN di daerah. Ini merupakan tantangan tersendiri mengingat tahun sebelumnya, tidak seluruh elemen TKD disalurkan KPPN di daerah.

Keberadaan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) walaupun belum lama keberadaannya, namun manfaatnya sudah dapat dirasakan dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Adapun dana APBN yang dikelola di wilayah Jambi mencapai Rp20,49 Triliun, yang terdiri dari pagu belanja Kementerian/Lembaga Rp6,57 Triliun dan TKD sebesar Rp13,92 Triliun. Berbagai kegiatan terkait pengelolaan keuangan negara sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholder*. Dengan adanya FKPKN, kesadaran untuk bersinergi semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan antusiasme terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPKN.

Permasalahan yang berulang setiap tahun anggaran masih saja terjadi. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan keuangan negara yang belum berkualitas. Dengan sinergi dan berkolaborasi, diharapkan semua *stakeholder* yang terkait dengan penyelenggaraan keuangan negara mampu menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas untuk menghadapi isu-isu pembangunan regional. Tidak terbatas pada pengelolaan Keuangan Daerah saja, namun juga dapat memberikan dukungan nyata di level ekonomi regional kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menumpuknya pencairan dana di akhir tahun masih saja terjadi di tahun 2022 walaupun intensitasnya semakin menurun. Namun demikian, hal ini menjadi perhatian pimpinan sehingga kegiatan-kegiatan yang mendukung perbaikan pelaksanaan anggaran terus menurun diadakan sejak awal tahun 2023 dalam rangka edukasi dengan harapan adanya perbaikan kualitas dalam pelaksanaan anggaran.

Dari berbagai dinamika dalam pengelolaan fiskal di daerah dan pengelolaan keuangan negara di daerah pada khususnya diperlukan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya sinergi antar unit terkait, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dengan kualitas yang lebih baik.



# **IDENTIFIKASI MASALAH**

**FKPKN TRIWULAN III TAHUN 2023**



## IDENTIFIKASI MASALAH

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi *Treasury, Regional Chief Economist (RCE)*, dan *Financial Advisor* dalam Triwulan III tahun 2023 menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Peningkatan sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan APBN, APBD serta dana TKD. Akselerasi penyaluran TKD merupakan tantangan tersendiri mengingat mulai tahun 2023, semua elemen TKD disalurkan melalui KPPN di daerah.
2. Peningkatan kerjasama untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Provinsi Jambi dengan pemangku kepentingan di Provinsi Jambi khususnya yang terkait pembiayaan.
3. Penguatan kelembagaan internal maupun eksternal Kemenkeu Satu dan peningkatan kompetensi pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jambi khususnya terkait penyusunan Kajian Fiskal Regional dan ALCo Regional.
4. Strategis Perbaikan Nilai IKPA dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan memperhatikan indikator dalam IKPA terutama indikator penyerapan anggaran dan capaian output
5. Penguatan dan Kerjasama dengan pihak Eksternal seperti akademisi, profesional lokal di bidang ekonomi dan keuangan negara (*local expert*) di wilayah Provinsi Jambi.
6. Koordinasi dengan pihak eksternal diperlukan lebih mendalam terkait isu-isu strategis seperti penanganan stunting, pengendalian inflasi daerah, pemulihan ekonomi dan menciptakan pelaksanaan Pemilu yang tertib dan aman.

Adapun terkait isu/permasalahan yang ada di Kanwil DJPb Jambi dan tindak lanjutnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

No	Isu/Permasalahan	Peran/Kontribusi/Tindak Lanjut/ Kanwil DJPb/ Kanwil Kemenkeu
1.	Perlunya untuk meningkatkan sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan APBN, APBD serta dana TKD.	Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN, APBD serta dana TKD seperti Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Pertukaran Data
2.	Peningkatan kerjasama untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Provinsi Jambi dengan pemangku kepentingan di Provinsi Jambi khususnya yang terkait pembiayaan.	Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Provinsi Jambi dalam pembiayaan seperti Koordinasi Pelaksanaan Sosialisasi Perluasan Cakupan Pembiayaan UMi di Dinas KUKM dan Sosialisasi Penyaluran Pembiayaan UMi kepada Koperasi
3.	Penguatan kelembagaan internal maupun eksternal Kemenkeu Satu dan peningkatan kompetensi pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jambi khususnya terkait penyusunan Kajian Fiskal Regional dan ALCo Regional.	Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan penguatan kelembagaan internal maupun eksternal Kemenkeu Satu

		seperti Rapat ALCO Regional Tingkat Teknis, Deputies dan Komite setiap bulannya serta Rapat FKPKN setiap semester.
4.	Strategis Perbaikan Nilai IKPA dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan memperhatikan indicator dalam IKPA terutama indikator penyerapan anggaran dan capaian output	Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan seperti FGD serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
5.	Penguatan dan kerjasama dengan pihak eksternal seperti akademisi, profesional lokal di bidang ekonomi dan keuangan negara ( <i>local expert</i> ) di wilayah Provinsi Jambi.	Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM seperti mengundang <i>local expert</i> pada acara <i>Sharing Session Analisis Ketimpangan Fiskal (Horizontal dan Vertikal)</i> di Provinsi Jambi bersama <i>Local Expert</i> .
6.	Koordinasi dengan pihak eksternal diperlukan lebih mendalam terkait isu-isu strategis seperti penanganan stunting, pengendalian inflasi daerah, pemulihan ekonomi dan menciptakan pelaksanaan Pemilu yang tertib dan aman.	Kepala Kanwil beserta jajarannya berpartisipasi dan berkontribusi aktif pada Rilis Bersama Perencanaan Provinsi Jambi Triwulan II 2023, Konsultasi Regional PDRB ISE Se-Sumatera Tahun 2023, <i>One on One Meeting</i> Pengendalian Inflasi Lingkup Provinsi Jambi serta Kegiatan Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023
7.	Perlu berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah/ Pimpinan Lembaga terkait supaya peran Kanwil sebagai <i>Treasury. Financial Advisor</i> , dan <i>Regional Chief Economist</i> dapat memberi dampak bagi masyarakat seperti pemulihan ekonomi dimana APBN yang memiliki peran dalam memantik pertumbuhan ekonomi.	Kepala Kanwil berkoordinasi aktif dengan Gubernur Jambi, Walikota Jambi, Kepala BI Jambi, dan Bupati dalam wilayah Provinsi Jambi sebagai Perwakilan Kemenkeu di Jambi.



# PELAKSANAAN KEGIATAN PERIODIK

**FKPKN TRIWULAN III TAHUN 2023**



## PELAKSANAAN KEGIATAN PERIODIK

### 1. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN II 2023 SATKER KPU PROVINSI JAMBI

#### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada hari Senin, 3 Juli 2023 bertempat di Kantor KPU Provinsi Jambi.

#### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dalam hal ini Bidang PPA I dan Tim Satker KPU Provinsi Jambi.

#### c. Rincian Kegiatan

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan tujuan konfirmasi perkembangan blokir non-AA dan perkembangan penyelesaian revisi satker yang dilakukan terpusat pada satker KPU Provinsi Jambi, konfirmasi atas program/kegiatan/output/jenis belanja satker yang s.d Juni masih rendah beserta permasalahan/hambatan yang mungkin dihadapi yang menjadi sebab, termasuk perkembangan belanja pada program penting K/L maupun belanja penting lainnya, dan pengawalan khusus belanja-belanja strategis pada masing-masing satker untuk *progress* triwulan II tahun 2023 termasuk pengawalan pada kinerja IKPA.

Nilai IKPA satker KPU Provinsi Jambi s.d. periode 3 Juli 2023 adalah sebesar 71,04. Nilai ini masih dibawah target satker yaitu 90. Adapun penyebab terjadinya *gap* tersebut adalah karena laporan capaian output yang belum dikirimkan sehingga nilai IKPA tersebut masih bersifat sementara. Di awal triwulan ini satker belum mengajukan perbaikan revisi halaman III DIPA karena saat ini sedang melakukan proses revisi DJA untuk seluruh lingkup KPU di Provinsi Jambi. Belanja prioritas pada KPU Provinsi Jambi adalah terkait tema Pemilu.



#### d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, Kanwil DJPb Provinsi Jambi memberikan rekomendasi diantaranya:

- 1) Melakukan koordinasi antar bagian dan pengelola keuangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Sehingga dapat sesuai dengan RPD dan Realisasi



2) KPU RI menurunkan anggaran secara bertahap sesuai Tahapan dan Kebijakan sehingga akan menyulitkan satker dalam melakukan Upaya menjaga IKPA agar tetap baik

## **2. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN II 2023 SATKER BKSDA JAMBI (238521) DAN SNVT PJPA SUMATERA VI (498067)**

### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Juli 2023 pada pukul 10.00 hingga 11.45 WIB bertempat di Kantor Satker BKSDA Jambi dan dilanjutkan pada pukul 15.30 hingga 17.00 WIB bertempat di Kantor Satker BWS Sumatera VI Jambi.

### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dalam hal ini Bidang PPA I dan Tim Satker BKSDA Jambi serta Tim Satker SNVT PJPA Sumatera VI.

### **c. Rincian Kegiatan**

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan tujuan konfirmasi perkembangan blokir non-AA dan perkembangan penyelesaian revisi satker yang dilakukan terpusat pada satker BKSDA Jambi dan SNVT PJPA Sumatera VI, konfirmasi atas program/kegiatan/output/jenis belanja satker yang s.d Juni masih rendah beserta permasalahan/hambatan yang mungkin dihadapi yang menjadi sebab, termasuk perkembangan belanja pada program penting K/L maupun belanja penting lainnya, dan pengawalan khusus belanja-belanja strategis pada masing-masing satker untuk *progress* triwulan II tahun 2023 termasuk pengawalan pada kinerja IKPA.

Untuk Satker BKSDA Jambi, ilai IKPA sampai dengan bulan Juni sebesar 80,7 dengan 3 indikator yang masih belum mencapai target seperti indikator 1) Deviasi Halaman III DIPA 67,84; 2) Penyerapan Anggaran 83,87; dan 3) Capaian Output 64,95. Pada awal triwulan II satker BKSDA Jambi belum melakukan pemutakhiran dan pengajuan revisi Halaman III DIPA sehingga RPD masih berdasarkan perencanaan di akhir tahun dan belum disesuaikan kembali berdasarkan kondisi di lapangan. Permasalahan yang dihadapi oleh satker ialah sebagai berikut:

- Terdapat blokir sebesar Rp1,16 M dengan blokir non-AA sebesar Rp400 juta. Belum terdapat info dari pusat terkait pembukaan blokir ini.
- Belum ada kontrak yang dilakukan. Progress saat ini masih berkoordinasi dengan konsultan dari Jerman dan perlu adanya approval. Hal ini menyebabkan realisasi mengalami kemunduran dan gap/deviasi RPD tinggi. Rencananya akan dilakukan pembayaran uang muka pembangunan gedung pada Triwulan III.

- Terdapat kegiatan Review Blok yang pelaksanaannya mundur dari perencanaan dan saat ini masih dalam proses pembahasan oleh tim terkait. Kemunduran pelaksanaan ini dikarenakan perubahan kondisi di lapangan.
- Terdapat permasalahan berulang yaitu penumpukan belanja di akhir tahun serta kurangnya koordinasi terkait mitigasi risiko. Satker telah melakukan koordinasi setiap bulannya, namun pelaksanaan beberapa kegiatan belum dapat diprediksi dengan akurat.

Untuk satker SNVT PJPA Sumatera VI Provinsi Jambi, Nilai IKPA pada bulan Juni pada satker SNVT PJPA ialah 62,07. Nilai ini turun dari bulan sebelumnya yaitu 80,09. Seluruh pagu blokir sebesar Rp4,4 M sudah dibuka di bulan Juni sehingga tidak terdapat blokir anggaran. Saat ini terdapat 6 kontrak existing yang kesemuanya baru terealisasi uang muka dan belum dilakukan pembayaran termin. Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh satker ialah sebagai berikut:

- Terdapat pergantian pejabat perbendaharaan di awal tahun s.d. triwulan II sehingga kegiatan satker berfokus pada pengubahan spesimen, dan *transfer knowledge*.
- Akan ada adendum kontrak untuk penyesuaian jumlah termin pembayaran yang menumpuk di triwulan III dan IV.
- Sebagian besar kontrak baru berjalan di bulan April karena belum terdapat kontrak di triwulan I disebabkan kegagalan tender yg dilaksanakan terpusat.

Sementara kendala yang dihadapi di lapangan terkait *progress* pekerjaan kontrak ialah sebagai berikut:

- Curah hujan yang tinggi menyebabkan akses ke lokasi proyek sulit dijangkau terutama karakteristik pekerjaan yang berhubungan dengan irigasi.
- Kondisi soisal masyarakat
- Pekerjaan di awal proyek diperlukan waktu untuk proses persiapan lahan dan konsolidasi
- Pasang surut air laut pada pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi di Kab. Tanjabtim. Jika sedang pasang, harus menunggu hingga 2 hari untuk bisa melanjutkan pekerjaan





**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, Kanwil DJPb memberikan rekomendasi diantaranya:

Satker BKSDA Jambi

- 1) Satker diimbau untuk melakukan koordinasi dengan K/L nya terkait pembukaan blokir non-AA.
- 2) Satker harus melakukan pengecekan realisasi anggaran yang dibandingkan dengan perencanaan kegiatan yang telah dibuat secara berkala untuk memonitor beberapa kegiatan yang kemungkinan tidak terlaksana atau mundur.
- 3) Satker harus melakukan revisi Hal III DIPA sesuai jadwal yang telah ditentukan di setiap awal triwulan. Sebelumnya satker diharapkan sudah melakukan koordinasi dan perencanaan dengan pihak-pihak terkait kegiatan yang akan dilaksanakan selama 3 bulan selanjutnya. Ke depannya, tidak hanya RPD namun satker juga harus menyampaikan target output sehingga satker pelu meningkatkan koordinasinya.
- 4) Satker dapat melakukan proyeksi realisasi berdasarkan trend realisasi di tahun-tahun sebelumnya ataupun metode lainnya yang mudah digunakan dan sesuai dengan kondisi satker.

Satker SNVT PJPA Sumatera VI Provinsi Jambi

- 1) Segera lakukan pengisian capaian output (bobot 25%) bulan Juni untuk meningkatkan nilai IKPA. Lakukan pengecekan progress pekerjaan, terutama pekerjaan fisik yang rencananya akan dibayarkan terminnya di bulan Juli.
- 2) Satker harus melakukan penyesuaian RPD Hal III DIPA sesuai dengan kebutuhan dan rencana kegiatan di setiap awal triwulan sesuai jadwal yang telah ditentukan, untuk triwulan III ini paling lambat tanggal 14 Juli 2023 untuk memperbaiki nilai indikator Hal III DIPA. Selain itu, satker juga harus meningkatkan koordinasi dengan eselon I-nya terkait progress revisi terpusat di DJA, sehingga segera setelah selesai agar segera mengajukan revisi Hal III DIPA ke Kanwil DJPb.
- 3) Satker harus mengecek dan memonitor realisasi terutama belanja modal yang masih perlu ditingkatkan performanya, terutama terkait output prioritas nasional.

5) Satker diimbau untuk melakukan mitigasi risiko terkait kendala di lapangan (cuaca, kondisi geografis, dan sosial masyarakat) yang berulang setiap tahun sehingga realisasi anggaran dapat disesuaikan.

### 3. **FOCUS GROUP DISCUSSION PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA LINGKUP KANWIL DJPB PROVINSI JAMBI**

#### a. **Waktu dan Tempat**

Kegiatan FGD dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 pada pukul 14.00 hingga 16.00 WIB secara daring melalui media Ms. Teams.

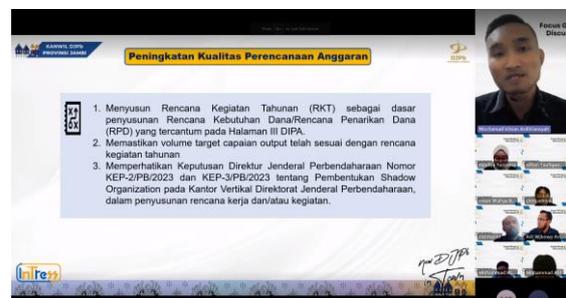
#### b. **Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

#### c. **Rincian Kegiatan**

Kegiatan FGD dilakukan bertujuan agar pelaksanaan anggaran dan PBJ pada satuan kerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi (BA 015.08-005) terlaksana dengan lancar, efektif, efisien, akuntabel, dan berintegritas. Serta tersusun LK UAPPA-W tahun 2023 yang andal, akuntabel, dan berkualitas.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi pembinaan pelaksanaan anggaran tahun 2023 yang membahas terkait peningkatan kualitas perencanaan anggaran, peningkatan kedisiplinan pelaksanaan kegiatan satuan kerja, akselerasi pelaksanaan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan KKP, efisiensi dan efektivitas belanja, penetapan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit, serta penerapan strategi pelaporan target dan realisasi capaian output. Kemudian, pemateri juga menyajikan monitoring nilai IKPA, deviasi halaman III DIPA, dan realisasi belanja masing-masing satker sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya, pemateri menyampaikan materi penguatan integritas dan tata kelola pelaksanaan anggaran serta dilanjutkan dengan sesi diskusi.



#### d. **Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan FGD, diharapkan kegiatan ini menjadi penguat koordinasi Kanwil DJPb Provinsi Jambi selaku UAPPA-W dan satker-satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

#### **4. KOORDINASI PELAKSANAAN SOSIALISASI PERLUASAN CAKUPAN PEMBIAYAAN UMKM MELALUI PENAMBAHAN CALON PENYALUR PEMBIAYAAN UMi DI DINAS KUKM KAB. BATANGHARI DAN MUARO JAMBI**

##### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan koordinasi dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 bertempat di Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Batanghari dan pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 bertempat di Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muaro Jambi.

##### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan di Kab. Batanghari dihadiri oleh Plt. Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Batanghari dan Kepala Bidang Perindustrian, sementara kegiatan di Kab. Muaro Jambi dihadiri oleh Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muaro Jambi, Kepala Seksi Pembiayaan Koperasi, dan Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim Kanwil DJPb Provinsi Jambi khususnya Bidang PPA II.

##### **c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan koordinasi dilakukan dalam rangka koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM terkait tujuan kegiatan sosialisasi erluasan cakupan pembiayaan UMKM melalui penambahan calon penyalur pembiayaan UMi kepada koperasi yang akan diadakan pada tanggal 5 September 2023 serta untuk bersinergi dengan berbagai pihak, untuk memastikan kehadiran koperasi-koperasi yang berpotensi sebagai calon penyalur pembiayaan UMi di Kab. Muaro Jambi dan Batanghari.

Beberapa hal yang disampaikan dalam kegiatan koordinasi diantaranya Dana UMi berasal dari BLU PIP dan saat ini PIP akan memperluas penyaluran UMi melalui koperasi. Pilloting penyaluran melalui koperasi sudah dilakukan untuk koperasi di Kota Jambi pada tahun lalu, mulai dari sosialisasi kepada koperasi, pendaftaran koperasi menjadi penyalur UMi, sampai dengan terpilihnya satu koperasi menjadi penyalur pembiayaan UMi yaitu Koperasi Al-Ishlah. Pada tahun 2023 akan dilaksanakan perluasan cakupan koperasi penyalur UMi ke koperasi di kabupaten/kota lainnya. Untuk itu Kanwil DJPb akan mengadakan Kegiatan Sosialisasi Perluasan Cakupan Pembiayaan UMKM Melalui Penambahan Calon Penyalur Pembiayaan UMi kepada Koperasi pada tanggal 5 September 2023 di Kanwil DJPb Provinsi Jambi. Untuk Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi, sesuai dengan daftar KSP yang sehat dan berkinerja baik yang telah dikirimkan sebelumnya oleh Dinas Koperasi, sosialisasi akan dilaksanakan kepada 5 KSP dari Kabupaten Batanghari dan 6 KSP di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Selanjutnya, diharapkan Dinas Koperasi dapat memastikan bahwa kelima koperasi dapat hadir pada acara sosialisasi.



#### **d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan koordinasi, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Kanwil DJPb Provinsi akan segera mengirimkan undangan sosialisasi ke koperasi melalui Dinas Koperasi.
- 2) Dinas Koperasi Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi bersedia untuk memastikan KSP di bawah binaannya untuk hadir dalam sosialisasi penyaluran UMi yang akan diadakan.
- 3) Dengan mengikuti kegiatan sosialisasi, diharapkan akan semakin banyak koperasi yang menjadi penyalur pembiayaan UMi di Provinsi Jambi.

### **5. ONE ON ONE MEETING PENGENDALIAN INFLASI LINGKUP PROVINSI JAMBI**

#### **a. Waktu dan Tempat**

Rapat dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu, 19 s.d. 20 September 2023 secara daring melalui *Teams Meeting*.

#### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh tim dari Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan 28 satuan kerja K/L di Provinsi Jambi yang memiliki aloksi dana terkait inflasi yaitu pada Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pusat Statistik.

#### **c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan *one on one meeting* dilakukan dalam rangka mendukung implementasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 264 Tahun 2023 tentang Program Penguatan *Regional Chief Economist* (RCE) dalam hal Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ikut terlibat dan berpartisipasi dalam keanggotaan

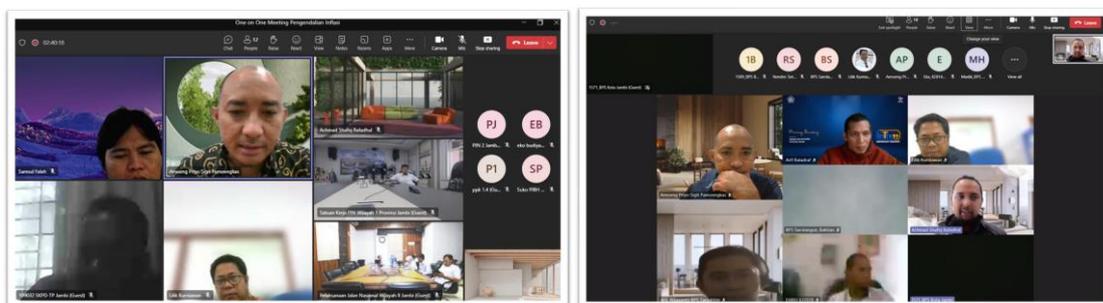


Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Peran strategis TPID mulai diraskan dalam rangka pengendalian inflasi regional sebagai pembentuk inflasi nasional. Koordinasi dan pertukaran informasi ini diharapkan dapat semakin baik dan dapat berkontribusi pada pengendalian inflasi.

Inflasi di Jambi sampai dengan Agustus 2023 telah mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga di bulan Juli dan Agustus 2023 Provinsi Jambi menjadi daerah dengan tingkat inflasi terendah secara nasional (1,92%) di bawah inflasi nasional sebesar 3,27%. Terkendalnya inflasi ini, salah satunya juga merupakan andil dari TPID yang turut serta melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi secara regional. Oleh karena itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi selaku anggota TPID sekaligus sebagai *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor* di daerah diharapkan mampu memberikan bahan masukan dan rekomendasi kebijakan dalam pengendalian inflasi yang dimulai dari penyediaan data pendukung melalui *one on one meeting* bersama dengan mitra kerjanya yang dalam hal ini satuan kerja Kementerian/Lembaga.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan anggaran, meliputi:

1. Perbedaan progres keuangan dan fisik kegiatan karena keterlambatan supplier dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengajukan tagihan.
2. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang bersifat kemitraan dengan anggota legislatif (penyampaian proposal terlambat, lokus kegiatan sebagian besar di luar Provinsi Jambi).
3. Keterlambatan kontrak pada kegiatan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur jalan, bandar udara.
4. Pemanfaatan infrastruktur irigasi yang belum signifikan pada sektor pertanian (yang merupakan komoditi penyumbang inflasi).
5. Pengambilan sampel data untuk perhitungan tingkat inflasi lingkup Provinsi Jambi hanya dilakukan pada 2 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Muara Bungo.



#### d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan *one on one meeting* yang telah dilaksanakan, rekomendasi yang dapat diusulkan antara lain:



- 1) **Keterjangkauan harga**, pemilihan lokasi pembangunan/revitalisasi pasar agar mempertimbangkan faktor kebutuhan masyarakat, potensi transaksi jual beli, kedekatan dengan pemukiman penduduk.
- 2) **Ketersediaan pasokan**, pemberian bantuan benih (tanaman dan ikan) serta pupuk perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan pemantauan dan pendampingan pada masa tanam dan panen.
- 3) **Kelancaran distribusi**, pemilihan lokus kegiatan pembangunan/preservasi jalan dan jembatan perlu dilakukan harmonisasi antara jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kab/kota, dengan mempertimbangkan sebaran daerah penghasil pasokan dan pengguna komoditi penyumbang inflasi.
- 4) **Komunikasi efektif**, BPS sebagai penyedia data dan informasi terkait inflasi agar dilibatkan dalam keanggotaan TPID Provinsi/Kabupaten/Kota.

## 6. KEGIATAN KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2023

### a. Waktu dan Tempat

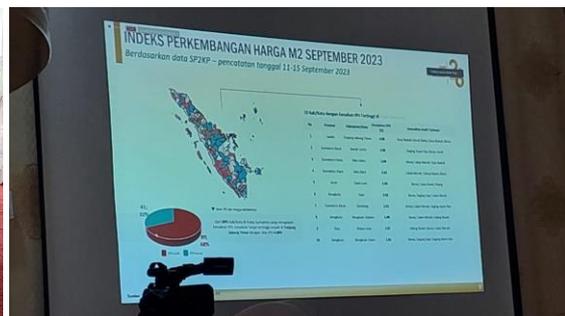
Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 18 September 2023 bertempat di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Bungo.

### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan FORKOPIMDA Kabupaten Bungo dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bungo termasuk di dalamnya adalah KPPN Muara Bungo.

### c. Rincian Kegiatan

Kegiatan ini merupakan agenda dari Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 bersama Menteri Dalam Negeri secara virtual. Agenda diawali dengan sambutan oleh tim dari Bupati Bungo yang dilanjutkan dengan mengikuti rapat secara virtual yang dipimpin secara langsung oleh Bapak Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri) dengan agenda Pengendalian Inflasi Tahun 2023.



### d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Fokus rakor pengendalian fiskal pada minggu ini adalah kenaikan harga beras dan harga ayam potong yang memiliki nilai Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi pada minggu ini. Kenaikan IPH beras disebabkan oleh

lambatnya penyaluran bansos beras yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, yaitu dalam pengiriman cadangan beras dari gudang bulog ke daerah-daerah yang sudah ditetapkan.

- 2) Pada rakor ini Kabupaten Bungo menjadi salah satu kabupaten yang berhasil mendapatkan predikat Kabupaten dengan Pengendalian Inflasi Terbaik Periode I Tahun 2023.
- 3) Pada rakor ini juga diingatkan kembali kepada kepala daerah yang kurang serius dalam menyikapi bantuan hukum yang dapat diberikan dari kejaksaan. Kesalahpahaman terjadi di kalangan kepala daerah yang berpendapat bahwa bantuan hukum yang diberikan dari Kejaksaan bersifat otomatis.
- 4) Pada akhir rapat, diinstruksikan kepada seluruh Tim TPID untuk menindaklanjuti hasil rapat ini dengan berkoordinasi lebih intens dengan BULOG pada masing-masing daerah untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga beras.

## **7. SOSIALISASI PENYALURAN PEMBIAYAAN UMI KEPADA KOPERASI DI KOTA JAMBI DAN KABUPATEN MUARA BUNGO**

### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa, 5 September 2023 bertempat di Ruang Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dan secara *hybrid* di KPPN Kuala Tungkal, serta hari Rabu, 6 September 2023 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Bungo dan secara *hybrid* di KPPN Sungai Penuh.

### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Koperasi dan Dinas Koperasi pada lingkup Provinsi Jambi serta Tim dari Bidang PPA II dan Tim dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

### **c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam rangka untuk menyosialisasikan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada koperasi-koperasi di dua lokasi yaitu Kota Jambi (untuk koperasi-koperasi lingkup Kota Jambi, Kab. Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat); serta Kota Muara Bungo (untuk koperasi-koperasi lingkup Kab. Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh), sebagai salah satu bentuk dari pemberdayaan UMKM dari sisi fasilitasi pembiayaan, serta bersinergi dengan berbagai pihak, khususnya Dinas Koperasi, PIP, KPPN lingkup Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Kegiatan di Kota Jambi dimulai dengan sambutan Bapak Irwan Wahyu Basuki (Plh. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi), sedangkan kegiatan di Kota Muara Bungo dimulai dengan sambutan Bapak H. Dedy Irawan, SE. MM. (Kepala Bappeda Kab. Bungo) dan Ibu Ambar Pusporini (Kepala KPPN Muara Bungo).



Kegiatan sosialisas, baik di Kota Jambi maupun Kota Muara Bungo dimoderatori oleh Bapak Fauzi Syafriel (Kepala Bidang PPA II).

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh Bapak Tonny Wahyu Poernomo (Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan II, Pusat Investasi Pemerintah (PIP)). Kemudian, paparan juga disampaikan oleh Ibu Desmawati selaku Bendahara Koperasi Al Ishlah dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

#### *Sosialisasi di Kota Jambi*



#### *Sosialisasi di Kota Muara Bungo*



#### **d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Sosialisasi Penyaluran Pembiayaan UMi kepada Koperasi diharapkan dapat memperluas cakupan pembiayaan UMKM melalui penambahan calon penyalur UMi yaitu Koperasi. Koperasi dipilih karena merekalah yang lebih memahami anggotanya.
- 2) Selanjutnya, Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan menyebarkan formulir kelengkapan data koperasi untuk menjadi penyalur UMi yang akan disebarakan melalui Dinas Koperasi.

## 8. RAPAT ALCO REGIONAL TEKNIS UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 JULI 2023

### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 14 Agustus 2023 pukul 14.00 s.d.16.00 WIB di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat pengawas Kanwil DJPb Provinsi Jambi, pejabat pengawas KPP Pratama Jambi Telanaipura, KPP pejabat pengawas Pratama Jambi Pelayangan, pejabat pengawas KPDDP Jambi, pejabat fungsional KPPBC TMP B Jambi, pejabat fungsional KPKNL Jambi, dan perwakilan pegawai lingkup Provinsi Jambi yang terlibat dalam tim Pokja Sekber RCE.

### c. Rincian Kegiatan

Rapat dibuka oleh Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C, Bapak Lilik Kurniawan. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 31 Juli 2023, serta topik yang akan dibahas dalam rapat yaitu terkait draft/konsep materi rapat (Realisasi Pendapatan dan Belanja s.d. 31 Juli 2023 dan Isu Strategis).

Pemaparan dilakukan oleh pejabat fungsional KPKNL Jambi, pejabat fungsional KPPBC TMP B Jambi, pejabat pengawas KPP Jambi Pelayangan, pejabat pengawas KPDDP Jambi, dan pejabat pengawas bidang PPA II.



### d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan, didapatkan beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Draft/konsep materi yang akan dipaparkan pada rapat ALCo tingkat Deputies dan Komite realisasi s.d. 31 Juli 2023.
- 2) Secara umum, Kapasitas fiskal antar daerah yang berbeda berpengaruh pada kemampuan untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan kebutuhan fiskal berkaitan dengan perbedaan tingkat capaian pelayanan publik, seperti persentase komposisi penduduk dari usia sekolah hingga pensiunan, kondisi geografis dan iklim, dan indeks kemiskinan dan pengangguran;
- 3) Provinsi Jambi dari tahun 2018 hingga Semester I 2023 memiliki pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif, dimana pada masa sebelum covid19

(2019) pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan begitu juga dengan ketimpangan fiskal vertikal yang terus mengalami penurunan. Dimasa covid19 hampir seluruh Kabupaten/Kota mengalami kesulitan baik dalam meningkatkan aktivitas ekonomi, ekspor, hingga ketimpangan fiskal juga merangkak naik.

- 4) Provinsi Jambi memiliki sektor unggulan dan Sumber Daya Alam dibidang Pertanian, Perkebunan, dan Pertambangan. Namun hasil yang diberikan belum memberikan nilai tambah (economic value added) baik bagi masyarakat, petani, maupun bagi ekonomi di daerah Jambi.
- 5) Begitupun dengan kegiatan ekspor. Saat ini barang-barang hasil Pertanian, Perkebunan, dan Pertambangan dari Provinsi Jambi belum dapat diekspor secara keseluruhan melalui pelabuhan di Provinsi Jambi, hal ini dikarenakan adanya alternatif biaya yang dikeluarkan oleh eksportir jika melalui pelabuhan lainnya.
- 6) Disisi lain, untuk meningkatkan potensi PAD yang telah ada, perlu adanya high political will dari Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan komitmen dalam pengambilan kebijakan untuk pelaksanaan Desentralisasi yang berkinerja, salah satunya penguatan SDM dan inovasi dalam penggalian potensi pajak daerah misalnya Pajak Bumi dan Bangunan.

## **9. RAPAT ALCO REGIONAL DEPUTIES UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 JULI 2023**

### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 pukul 14.00 s.d. 16.00 WIB secara *hybrid* di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi bagi Pejabat Administrator pada Unit Kemenkeu yang berlokasi di Kota Jambi dan melalui media virtual *Teams* (*Meeting ID*: 435 226 251 715; *Passcode*: 6ZdSzN).

### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat administrator Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala KPPN lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPP lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPKNL Jambi, Kepala KPDDP Jambi, Perwakilan Kepala KPPBC Jambi, Perwakilan Pejabat Pengawas Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, dan perwakilan pejabat fungsional dan pegawai lingkup Provinsi Jambi.

### **c. Rincian Kegiatan**

Rapat dibuka oleh MC dan dimoderatori oleh Kepala Seksi PPA IIB, Bapak Bernand Situmorang. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 31 Juli 2023 serta topik yang akan dibahas dalam rapat. Dalam rapat ini dilakukan pembahasan terkait:

- 1) Realisasi penerimaan perpajakan, isu strategis dan local issue (KPP Pratama Muara Bungo)



- 2) Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai (KPPBC TMP B Jambi).
- 3) Realisasi Penerimaan Lingkup DJKN, Special Mission dan isu strategis serta terkait Pokja UMKM (KPKNL Jambi)
- 4) Realisasi Belanja APBN, dan Isu Strategis (PPA I)
- 5) Perkembangan Ekonomi Regional dan Realisasi TKD (PPA II)

Pemaparan dilakukan oleh Kepala KPPBC TMP B Jambi, Kepala KPKNL Jambi, Perwakilan Kepala Bidang PPA I, Kepala Bidang PPA II, dan Kepala KPP Pratama Muara Bungo.



#### d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan, didapatkan beberapa poin sebagai berikut terkait Isu Tematik ALCo: Analisis Ketimpangan Fiskal Vertikal (*Vertical Fiscal Imbalance*) Regional antara Pusat dan Daerah:

- 1) Mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan Economic Value Added atas hasil Sumber Daya Alam yang ada melalui hilirisasi produk
- 2) Mendorong Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Pusat untuk dapat memberikan fasilitas dan dukungan dalam mendukung aktivitas ekspor yang dapat memberikan multiplier effect pada PAD Provinsi Jambi
- 3) Mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat memanfaatkan UU HKPD dalam memaksimalkan kemudahan berinvestasi, dengan investasi berkualitas yang memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.

### 10. RAPAT ALCO REGIONAL KOMITE UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 JULI 2023

#### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2023 pukul 10.30 s.d. 12.30 WIB secara daring melalui media virtual Teams (*Meeting ID: 493 276 670 288; Passcode: T3v9Wq*)

#### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Pejabat Administrator Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Kepala KPPN lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPP lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPPBC TMP B Jambi, Kepala KPKNL





melibatkan seluruh unit Kemenkeu Satu dan diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi kerja keras yang menjadi contoh di tingkat nasional.

7. Setuju dengan pemaparan Prof. Junaidi terkait ketimpangan fiskal horizontal dan vertikal. Secara kumulatif kontribusi transfer ke daerah kurang lebih 80% dan 20% kemandirian sosialnya. Jika dilihat per pemda, hanya beberapa pemda yang PAD nya tinggi sedangkan sisanya rendah. Kita harus mendorong Pemda meningkatkan PAD. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa juga dengan rekomendasi yang diberikan Prof Junaidi. Cara lain adalah mendorong pemda menindaklanjuti UU HKPD yang sudah ditetapkan PP nya dgn membuat PDRD dan segera ditetapkan ketentuannya sehingga dapat diterapkan di lapangan.

## **11. RAPAT ALCO REGIONAL TEKNIS UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 AGUSTUS 2023**

### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 12 September 2023 pukul 14.00 s.d.16.00 WIB di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat pengawas Kanwil DJPb Provinsi Jambi, pejabat pengawas KPPN Jambi, pejabat fungsional KPPBC TMP B Jambi, pejabat fungsional KPKNL Jambi, pejabat pengawas KPP Pratama Jambi Telanaipura, KPP pejabat pengawas Pratama Jambi Pelayanan, dan perwakilan pegawai lingkup Provinsi Jambi yang terlibat dalam tim Pokja Sekber RCE.

### **c. Rincian Kegiatan**

Rapat dibuka oleh Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C, Bapak Lilik Kurniawan. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 31 Agustus 2023, serta topik yang akan dibahas dalam rapat yaitu terkait draft/konsep materi rapat (Realisasi Pendapatan dan Belanja s.d. 31 Agustus 2023 dan Isu Strategis).

Pemaparan dilakukan oleh perwakilan pejabat pengawas KPKNL Jambi, perwakilan pejabat pengawas KPPBC TMP B Jambi, perwakilan pejabat pengawas KPP Pratama Jambi Telanaipura, perwakilan pejabat pengawas bidang PPA I, dan pejabat pengawas bidang PPA II.



**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan, didapatkan beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Perlu Pembangunan ekonomi merupakan perubahan ke arah yang lebih baik melalui berbagai upaya yang terencana dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat
- 2) Keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat terlihat dari tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan pemerataan pendapatan, akan berdampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah, yang akhirnya menyebabkan ketimpangan regional
- 3) Sesuai dengan perhitungan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil, ketimpangan yang ada di Provinsi Jambi ada yang level sedang mendekati tinggi, dimana hal ini berasal dari tingginya ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jambi dengan kontribusi tertinggi berasal dari Kab. Tanjung Jabung Barat.
- 4) PDRB per Kapita memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap ketimpangan, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara kuat. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020, Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki pertumbuhan ekonomi negatif namun ketimpangan antara 2 Kabupaten Kota ini sangat jauh. Ketimpangan Tanjung Jabung Barat lebih tinggi dari Kota Jambi
- 5) Kota Jambi hingga saat ini masih menjadi pusat permintaan dan penawaran yang akhirnya berdampak pada PDRD dan PDRB. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh memiliki PDRB yang rendah dengan jumlah penduduk paling sedikit, sehingga memiliki PDRB per Kapita tinggi dan ketimpangan yang cukup tinggi
- 6) Beberapa faktor utama pemicu ketimpangan pembangunan daerah antara lain perbedaan kandungan Sumber Daya Alam, perbedaan kondisi demografi, konsentrasi kegiatan perekonomian daerah, dan perbedaan alokasi dana pembangunan antar daerah
- 7) Selain sumber daya alam, perlu memperhatikan faktor-faktor produksi lainnya dalam pembangunan yang ada di masing-masing wilayah agar dapat mendukung pengelolaan Sumber Daya Alam yang dimiliki diantaranya Sumber Daya Manusia, Modal, dan Teknologi Informasi
- 8) Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan local potency tiap-tiap wilayah menuju pemerataan pembangunan infrastruktur fisik yang mencakup aksesibilitas jalan dan pasar. Dengan demikian, diharapkan investasi akan bermunculan dan dapat meminimalisir kesenjangan.

- 9) Menggerakkan ekonomi desa yang mengarah pada semakin menggeliatnya aktivitas-aktivitas ekonomi desa melalui stimulus pengembangan UMKM yang mencakup: 1. Digitalisasi (Aktivitas usaha yang digerakkan dari desa ke kota), 2. Teknologi (Penggunaan teknologi dalam produksi dan pemasaran), 3. Inovasi (Input, Proses, Output, Pemasaran), 4. Kreativitas (Pasar dan Produk Terbaru).

## **12. RAPAT ALCO REGIONAL DEPUTIES UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 AGUSTUS 2023**

### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, 15 September 2023 pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB secara *hybrid* di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi bagi peserta di Kota Jambi dan melalui media virtual *Teams* (*Meeting ID: 494 391 833 265; Passcode: DvpCLd*) bagi peserta dari luar Kota Jambi.

### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh Pegawai Administrator Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala KPPN lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPP lingkup Provinsi Jambi, Perwakilan Kepala KPPBC TMP B Jambi, Kepala KPKNL Jambi, Kepala KPDDP Jambi, Perwakilan Pejabat Pengawas Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, Perwakilan Pejabat Fungsional Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, dan Perwakilan Pegawai Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi.

### **c. Rincian Kegiatan**

Rapat dibuka oleh MC dan dimoderatori oleh Kepala Bidang PAPP, Bapak Tri Djoko Yulianto. Dalam pembukaan disampaikan *rundown* pelaksanaan ALCO Regional s.d. 31 Agustus 2023 serta topik yang akan dibahas dalam rapat. Dalam rapat ini dilakukan pembahasan terkait:

- 1) Realisasi penerimaan perpajakan, isu strategis dan local issue (KPP Pratama Bangko)
- 2) Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai, isu strategis dan *local issue* (KPPBC TMP B Jambi).
- 3) Realisasi Penerimaan Lingkup DJKN, Special Mission dan isu strategis serta terkait Pokja UMKM (KPKNL Jambi)
- 4) Realisasi Belanja APBN, dan Isu Strategis (PPA I)
- 5) Perkembangan Ekonomi Regional, Realisasi TKD, dan issue strategis (PPA II)



**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan, didapatkan beberapa poin sebagai berikut:

1) Isu jalan lintas batu bara

- Mempercepat pembangunan jalan khusus untuk angkutan Batu Bara.
- Meningkatkan intensitas perawatan dan perbaikan jalan ruas yang dilalui angkutan batubara eksisting.

2) Isu meningkatnya peredaran rokok illegal

- Pengawasan yang efektif dari hulu ke hilir dimana melibatkan beberapa instansi vertikal BC.
- Melakukan pengumpulan data dan kajian terkait pendirian KIHT di Kabupaten Kerinci.

3) Isu tidak tercatatnya banyak komoditi ekspor

- Menindaklanjuti hasil kajian pendirian PLB Ekspor di daerah penghasil komoditas unggulan.
- Melakukan pengumpulan data terkait pendirian PLB Ekspor yang telah didiskusikan bersama Pemda terkait.

4) Isu Proyek Strategis Nasional

Bagi Satker terkait perlu menindaklanjuti dalam:

- Menetapkan pengelola keuangan Satker PJBH
- Menyusun Kontrak PBJ sesuai target penyerapan anggaran sesuai ketentuan
- Menyusun RPD sesuai kontrak
- Merevisi anggaran dari PJI I ke Satker Baru
- Menyusun timeline pelaksanaan kegiatan
- Menyusun manajemen risiko atas pelaksanaan kegiatan

5) Pemberdayaan UMKM

- Mengidentifikasi UMKM yang memerlukan pembinaan Kemenkeu Satu
- Merumuskan Kontribusi Yang Dapat Diberikan Oleh Masing Masing Es1
- Melakukan Kolaborasi Dengan Pihak Lain Dalam Pengembangan UMKM

- Melakukan Kegiatan Bersama Kemenkeu Satu Dalam Pembinaan UMKM
- 6) Isu Tematik ALCo: Analisis Ketimpangan Fiskal Vertikal (*Vertical Fiscal Imbalance*) Regional antara Pusat dan Daerah yaitu dengan mendorong Pemerintah Daerah untuk:
- Menerbitkan kebijakan-kebijakan dalam memperkuat struktur perekonomian, kualitas pendidikan, dan infrastruktur aksesibilitas antar wilayah di daerah-daerah tertinggal.
  - Mengoptimalkan pengembangan komoditas unggulan dan meningkatkan aktivitas industri pengolahan (hilirisasi produk), serta mengembangkan Kawasan Ekonomi Terpadu/Kawasan Ekonomi Khusus.
  - Lebih aktif dalam memasarkan potensi ekonomi unggulan untuk menarik investor, dan intensif koordinasi bersama swasta terkait rencana investasi.

### **13. RAPAT ALCO REGIONAL KOMITE UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 AGUSTUS 2023**

#### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 September 2023 pukul 10.00 s.d. 12.30 WIB melalui media virtual Teams (*Meeting ID: 468 683 228 200; Passcode: UsWSxU*).

#### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Pejabat Administrator Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Kepala KPPN lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPP lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPPBC TMP B Jambi, Kepala KPKNL Jambi, Kepala KPDDP Jambi, Perwakilan Pejabat Pengawas Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, Local Expert Provinsi Jambi, Perwakilan Pejabat Fungsional Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, dan Perwakilan Pegawai Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi.

#### **c. Rincian Kegiatan**

Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Umum, Bapak Irwan Wahyu Basuki. Dalam pembukaan disampaikan *rundown* pelaksanaan ALCo Regional s.d. 31 Agustus 2023 serta topik yang akan dibahas dalam rapat terkait kinerja realisasi APBN baik dari sisi penerimaan perpajakan, penerimaan bea dan cukai, penerimaan PNPB dan Hibah, dan capaian realisasi belanja serta kinerja ekonomi dan regional s.d. 31 Agustus 2023 serta *issue* strategis lainnya.



URAIAN	2023			2022		
	PAJG	REAL	% REAL	PAJG	REAL	% REAL
<b>Penerimaan</b>	<b>8.581,17</b>	<b>8.243,78</b>	<b>96,18%</b>	<b>8.654,53</b>	<b>4.708,33</b>	<b>54,41%</b>
1 Pendapatan Asli Daerah	1.311,62	1.312,79	100,12%	1.311,62	1.410,31	107,49%
2 Pajak dan Retribusi Daerah	2.284,47	1.778,82	78,35%	2.035,40	2.331,34	114,60%
3 Pajak Bumi dan Bangunan	171,18	20,34	11,88%	204,47	88,60	43,34%
4 Cukai	842	538	63,91%	130	172	132,31%
5 Pajak Lain-lain	868,22	432,13	49,78%	77,84	47,79	61,39%
6 Bea Masuk	5,81	5,20	89,34%	8,01	11,88	148,32%
7 Pajak Kendaraan Bermotor	85,67	77,23	90,15%	124,04	126,12	101,60%
8 Pajak Pertambahan Nilai	556,35	467,44	83,86%	411,44	371,54	90,31%
9 Pajak Penghasilan	2.442,72	1.276,64	52,27%	1.189,88	1.792,48	150,76%
10 Lain-lain	1.841,75	1.071,66	58,20%	1.750,48	1.147,38	65,50%
11 Belanja	1.048	630,81	60,29%	1.048	486,61	46,53%
12 Transfer ke Daerah dan Dana Desa	15.877,28	8.558,08	54,59%	13.843,20	8.743,38	62,73%
13 Hibah dan Bantuan Sosial	13.214,20	7.607,22	57,57%	13.680,31	7.850,02	57,46%
14 Dana Perimbangan	7.948,80	6.601,88	83,19%	1.000,00	1.000,00	100,00%
15 Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.053,77	272,75	25,88%	1.138,86	222,00	19,56%
16 Dana Insentif Daerah	1.948,79	1.318,12	67,70%	1.930,00	1.000,00	51,81%
17 Dana Desa	4.411,36	2.882,23	65,34%	1.154,33	676,45	58,52%
18 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
19 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
20 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
21 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
22 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
23 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
24 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
25 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
26 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
27 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
28 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
29 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
30 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
31 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
32 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
33 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
34 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
35 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
36 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
37 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
38 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
39 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
40 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
41 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
42 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
43 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
44 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
45 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
46 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
47 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
48 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
49 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
50 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
51 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
52 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
53 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
54 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
55 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
56 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
57 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
58 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
59 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
60 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
61 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
62 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
63 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
64 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
65 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
66 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
67 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
68 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
69 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
70 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
71 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
72 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
73 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
74 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
75 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
76 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
77 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
78 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
79 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
80 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
81 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
82 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
83 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
84 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
85 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
86 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
87 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
88 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
89 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
90 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
91 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
92 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
93 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
94 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
95 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
96 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
97 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
98 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
99 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%
100 Lain-lain	1.122,88	800,04	71,26%	1.154,33	676,45	58,52%

**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan hal yang disampaikan oleh perwakilan Kantor Wilayah masing-masing instansi Kementerian Keuangan yang ada di daerah pada rapat Komite ALCo regional Provinsi Jambi untuk realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023, sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Kepala Kanwil Ditjen Provinsi Jambi menyampaikan beberapa arahan, diantaranya:

1. Terima kasih kepada narasumber dan selamat kepada pejabat pengawas/administrator yang mutasi dan promosi.
2. Terima kasih dari sisi penerimaan menunjukkan angka yang positif dan optimis sampai dengan akhir tahun, bahkan bea cukai sudah mencapai 113%. Di sisi lain, dari prognosisnya pajak sampai akhir tahun juga lebih dari 100% meskipun tidak ada lagi Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS).
3. Secara total penerimaan negara sudah mencapai 74,72% dan termasuk PNBPN yang disumbang paling besar oleh PNBPN BLU yang diantaranya UNJA, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, RS Bhayangkara, Rumkit Bratanata, dan Poltekkes.
4. Dari sisi belanja negara sudah mencapai hampir 60%. Kalau dilihat dari dua kelompok besarnya, belanja KL sudah mencapai 53% s.d. akhir Agustus meskipun agak berat karena s.d. akhir September harus sudah mencapai angka sekitar 72% dengan variasi target nasionalnya belanja pegawai 75%, belanja barang 70%, belanja modal 70%, dan belanja bansos 75%. Oleh karenanya, realisasi belanja s.d. akhir September harus mengejar 12%. Namun demikian harus kita akan tetap upayakan secara maksimal. Ada beberapa satker pagu besar tetapi realisasinya masih kecil, salah satunya yaitu satker Tol Tempino Banyu Lencir.
5. Berdasarkan data yang ada, DJKN sudah ada Rp115,9 miliar untuk pembebasan lahan dan hampir 100%. Semoga dapat selesai sesuai target yaitu pertengahan tahun depan.
6. Dari total TKD yang telah teralisasi, jika dilihat dari kontribusinya terhadap APBD Jambi maka sebesar 79,94% dari Pendapatan APBD atau kemandirian fiskal pemda 20,44% dengan pemda yang kemandirian fiskalnya tertinggi adalah Provinsi Jambi.

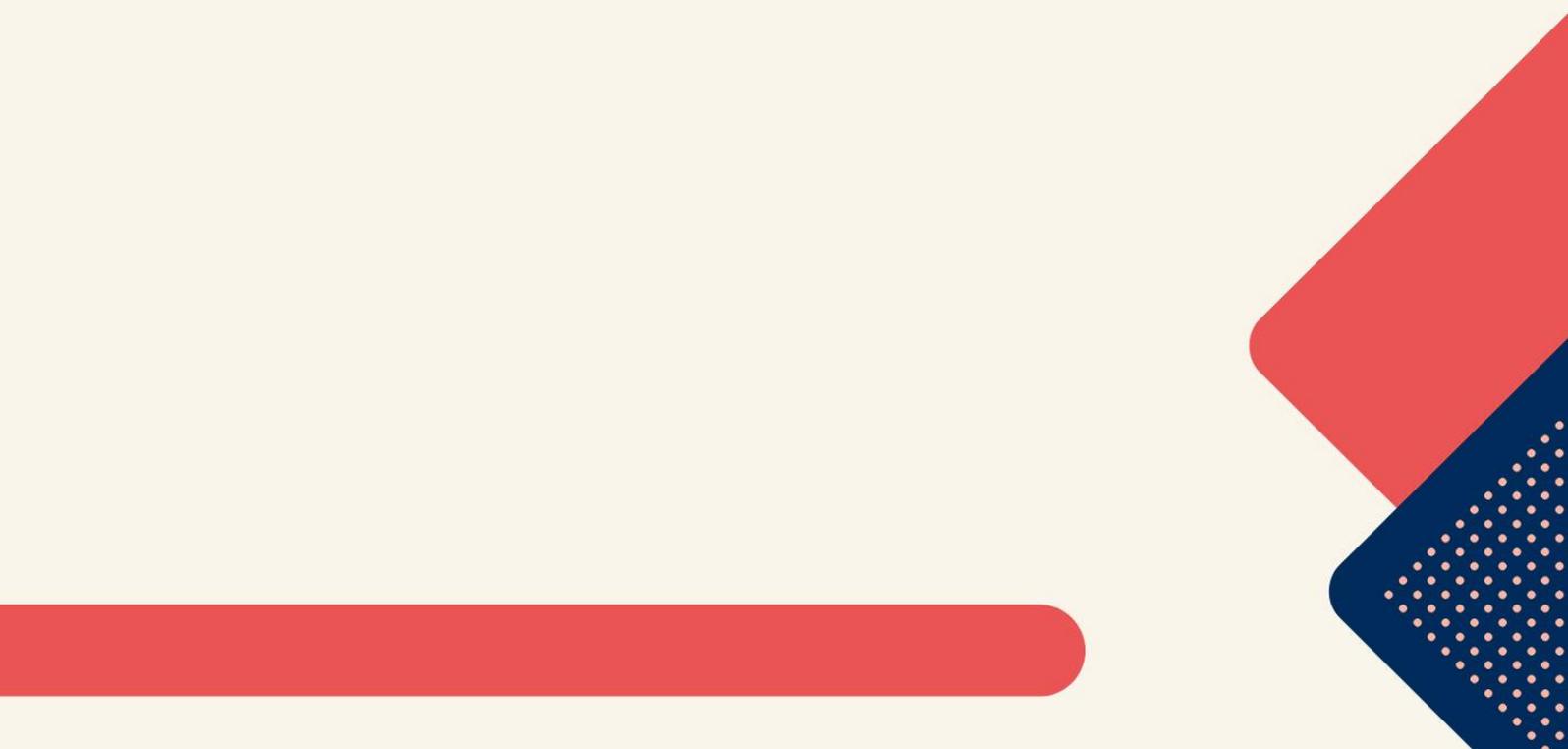


7. Dari kajian-kajian yang dilakukan serta *sharing session* yang telah dilakukan, dalam rangka menghadapi ketimpangan dan terlepas dari berbagai faktor, berdasarkan perhitungan dengan indeks Williamson dan indeks Entropi Theil, terdapat masukan dari Bapak Zulgani yang pertama perlunya reinvestasi, kedua pengembangan SDM (reinventarisasi) dan saya kira perlunya *the right man in the right place*, ketiga kualitas pembangunan infrastruktur dan semoga Jambi mendapatkan perpanjangan investasi pemeliharaan jalan rusak tahun depan.
8. Jika dikaitkan dengan dengan kemampuan daerah, walaupun mulai 2023 untuk DAU specific grant sudah terbagi presentase untuk masing-masing bidang. Diharapkan jika dapat diimplementasikan secara konsisten, maka hasilnya dapat lebih meningkatkan.
9. DAK Fisik memiliki system *by proposal* yang mana proposal diberikan oleh daerah dan daerah meyakinkan isi proposal tersebut kepada DJPK sehingga dapat dialokasikan. Alokasi anggaran DAK Fisik Jambi paling besar adalah untuk infrastruktur.
10. Saya sepakat untuk analisis ketimpangan dapat dibuat sesi lanjutan dan bagaimana kita dapat lihat bersama sehingga dapat membantu *stakeholder* terkait, utamanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjadi bagian dari rekomendasi kita.



# **PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS/ TEMATIK**

**FKPKN TRIWULAN III TAHUN 2023**



## PELAKSANAAN KEGIATAN TEMATIK

### 1. FGD IMPLEMENTASI PROGRAM *BIOCARBON FUND* DALAM KERANGKA PENGUATAN TATA KELOLA DANA PERUBAHAN IKLIM DI PROVINSI JAMBI

#### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 bertempat di Swiss-Belhotel.

#### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dihadiri Kepala Bidang PPA II, Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi Jambi, Sekretariat Program BioCF ISFL Provinsi Jambi, Koordinator Konsorsium OCFI, dan OJK Jambi.

#### c. Rincian Kegiatan

Program BioCF ISFL – JSLMP (*Bio Carbon Fund Integrated Sustainable Forest Landscape – Jambi Sustainable Landscape Manajement Project*) di Provinsi Jambi merupakan upaya untuk pencapaian target 10% dari target penurunan emisi nasional yang sebesar 140 juta ton CO<sub>2</sub>. Pada tahap *pra-investment*, dana yang dialokasikan adalah sebesar USD 13,5 juta melalui skema hibah terencana dan on granting atau penerusan hibah. Agenda dibuka oleh MC dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi Jambi, yaitu Bapak Ahmad Subhan. Acara inti yaitu pemaparan materi tentang Implementasi Program BioCF ISFL di Provinsi Jambi oleh Sekretariat Program BioCF ISFL Provinsi Jambi, Ibu Risti. Dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang Kajian Penguatan Tata Kelola Dana Perubahan Iklim di Indonesia dan Provinsi Jambi oleh Koordinator Konsorsium OCFI, Bapak Muh Affan dan ditutup dengan diskusi.



#### d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan kegiatan FGD yang telah dilakukan, didapatkan poin-poin sebagai berikut:

- 1) Program BioCF ISFL – JSLMP (*BioCarbon Fund Integrated Sustainable Forest Landscape – Jambi Sustainable Landscape Manajement Project*) di Provinsi Jambi merupakan upaya untuk pencapaian target 10% dari target penurunan emisi nasional yang sebesar 140 juta ton CO<sub>2</sub>. Pada tahap *pra-investment*, dana yang dialokasikan adalah sebesar USD 13,5 juta melalui skema hibah terencana dan *on granting* atau penerusan hibah;
- 2) Tahap selanjutnya adalah pembayaran kinerja dengan skema *Result Base Payment* (RBP) dimana negara donor melalui *World Bank* telah menyediakan dana insentif sebesar USD 70 juta, yang dituangkan dalam kesepakatan pada *Emission Reduction Payment Agreement* (ERPA) apabila berhasil menurunkan emisi yang telah ditargetkan;
- 3) Hasil kajian awal penguatan tata Kelola dana perubahan iklim di Provinsi Jambi disimpulkan bahwa Provinsi Jambi kerap menerima proyek perubahan iklim dari berbagai sumber pendanaan luar negeri. Tahun 2022-2023 Provinsi Jambi menerima bantuan hibah luar negeri dari BioCF ISFL sebesar Rp57,07 miliar. Sudah terdapat kerangka konseptual *good governance* pada proyek BioCF ISFL di Provinsi Jambi;
- 4) Tantangan kedepan pelaksanaan program adalah: (1) dari sisi kelembagaan belum ada instansi atau unit di Provinsi Jambi yang akan mengelola secara khusus dana tahapan pembayaran kinerja atau RBP; (2) belum ada dasar hukum atau petunjuk teknis dari Kemendagri, Kementerian LHK atau BPD LH untuk pembentukan lembaga tersebut; (3) kendala *tagging* program dan pengukuran capaian output pada sistem informasi keuangan daerah.

## 2. PENGAYAAN MATERI LOMBA BEDAH DATA APBD 2023

### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 yang dilakukan secara luring yang bertempat di Ruang Aula Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dilakukan dengan melibatkan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dalam hal ini adalah Bidang PPA II, Semifinalis Lomba Bedah Data APBD 2023 wilayah Provinsi Jambi dari MAN Insan Cendekia, SMAIT Nurul Ilmi, dan SMAS Unggul Sakti.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan rapat dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan *awareness*, *social control*, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah melalui APBD, meningkatkan perekonomian dan keuangan daerah sebagai tujuan penajaman tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai RCE, melaksanakan peran RCE dengan memaparkan materi konsep dasar keuangan negara yang memperhatikan potensi dan sektor unggulan daerah, memberikan pelatihan/pengayaan kepada peserta guna menunjang kesiapan peserta di babak semifinal, sehingga peserta semifinal memiliki pemahaman dan kemampuan yang relatif sama terkait penyusunan poster/infografis/videografis mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang PPA II dengan pemaparan singkat mengenai konsep dasar APBD dan UU HKPD. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama dengan peserta semifinalis beserta guru pendamping serta penyampaian masing-masing tema analisis yang akan digali antara lain terkait belanja kesehatan, belanja modal, dan dana lingkungan hidup.



**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan *sharing session* yang telah dilaksanakan, didapatkan hal sebagai berikut:

- 1) Kanwil DJPb siap melakukan kolaborasi dengan menyediakan data yang dibutuhkan peserta dalam seleksi tahap semifinal.
- 2) Isu terkini yang dapat dikaji lebih lanjut adalah terkait stunting, kinerja pengelolaan sampah Kota Jambi, dan pemeliharaan jalan daerah Provinsi Jambi.
- 3) Berdasarkan data *time series*, masa pandemi Covid-19 merupakan *outlier*, sehingga dapat dilakukan analisis terhadap masa sebelum, selama, dan setelah pandemi.

**3. MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA PERTUKARAN DATA DENGAN PEMKAB BUNGO**

**a. Waktu dan Tempat**

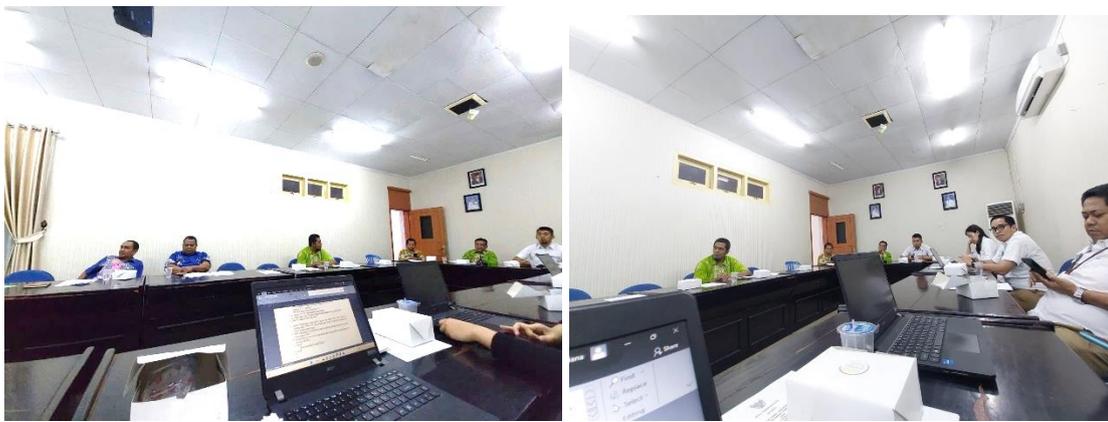
Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Bungo.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan dihadiri oleh Sekretaris BPKAD, Perwakilan Bagian Kerja Sama Kelembagaan dan Bagian Hukum Pemkab Bungo, Kepala Bidang PPA II, Kepala KPPN Muara Bungo, dan Perwakilan Pejabat Pengawas dan pelaksana Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembaharuan Nota Kesepakatan PRJ-08/WPB.06/2022 antara Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Bungo tentang Sinergi Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

**d. Hasil yang Dicapai**

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan, hasil reviu Nota Kesepakatan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan Pemkab Bungo akan dirapihkan kembali oleh bidang kerja sama dari Pemkab Bungo untuk selanjutnya dikirimkan ke Kanwil DJPb Jambi untuk diperiksa kembali dan setelah draft NK disepakati, akan diatur lebih lanjut terkait jadwal dan lokasi penandatanganan.

**PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS****1. RILIS BERSAMA PEREKONOMIAN PROVINSI JAMBI TRIWULAN II 2023****a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 7 Agustus 2023 pada pukul 13.30 hingga 16.00 WIB bertempat di Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi,

Perwakilan Otoritas jasa Keuangan Provinsi Jambi, Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan media massa.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan *press release* dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi yang menyeluruh kepada masyarakat terkait dengan Kinerja Fiskal di Provinsi Jambi baik itu APBN dan APBD, *outlook* perekonomian provinsi Jambi ke depan dan Pertumbuhan Perekonomian Provinsi Jambi Triwulan II 2023. Kegiatan ini merupakan sinergi dari Kanwil DJPb Provinsi Jambi, BPS Provinsi Jambi dan Perwakilan Bank Indonesia untuk memberikan informasi yang menyeluruh dan seluas-luasnya serta mendorong perekonomian Provinsi Jambi menuju Provinsi Jambi yang sejahtera.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan paparan *outlook* perekonomian Provinsi Jambi (*forward looking*) dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan Kinerja Fiskal baik itu APBN dan APBD di Provinsi Jambi oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi kemudian paparan terkait dengan pertumbuhan perekonomian Triwulan II 2023 Provinsi Jambi, sesi pertanyaan yang diajukan oleh media massa.



**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan kegiatan rilis bersama yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. *Outlook* perekonomian Provinsi Jambi diperkirakan masih akan bertumbuh dengan konsumsi domestik yang akan menjadi penyumbang pertumbuhan yang di topan oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah namun sedikit tertahan oleh harga komoditas unggulan Provinsi Jambi yang menurun yang diakibatkan oleh menurunnya permintaan global.
2. Pengeluaran pemerintah mengalami pertumbuhan yang signifikan pada Triwulan II baik itu APBN maupun APBD. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yaitu Jalan Tol Betung Tempino turut mendorong pertumbuhan Belanja Pemerintah selain pertumbuhan dari sisi belanja pegawai yang di dorong oleh pembayaran THR dan Gaji ke 13.

3. Perekonomian Provinsi Jambi tumbuh 4,8% (yoy) pada triwulan II 2023. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian secara nasional. Pertumbuhan perekonomian provinsi jambi triwulan II tahun 2023 didorong oleh pertumbuhan Konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kawasan Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secara (y-on-y) sedikit lebih tinggi. Di sisi lain, perekonomian Jambi memberikan kontribusi 6,52% dari total perekonomian kawasan Sumatera, sudah lebih tinggi dibandingkan kondisi pra-pandemi.

## **2. KONSULTASI REGIONAL PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO INDIKATOR SOSIAL EKONOMI SE-SUMATERA TAHUN 2023**

### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9–11 Agustus 2023 di Hotel BW Suite Belitung. Pada tanggal 9 Agustus, dilaksanakan kegiatan *High Level Meeting* (HLM) Evaluasi Konreg PDRB-ISE se-Sumatera Tahun 2022. Selanjutnya, Konreg PDRB-ISE se-Sumatera Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023.

### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan adan Pusat Statistik se-Sumatera (104 orang), Bappeda Provinsi se-Sumatera (54 orang), Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-Sumatera (30 orang), Diskominfotik Provinsi se-Sumatera (38 orang), Kantor Wilayah DJPb se-Sumatera (40 orang), beserta undangan lainnya (31 orang).

### **c. Rincian Kegiatan**

Konreg PDRB-ISE se-Sumatera Tahun 2023 mengusung tema “Penguatan Koridor Ekonomi Sumatera Menuju Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan masukan kepada pihak pemerintah dalam perencanaan dan percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah Sumatera. Konreg ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk keserasian informasi berbagai aspek terkait dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional wilayah Sumatera sehingga terwujud kesepakatan bersama antara 5 instansi peserta Konreg se-Sumatera dalam penentuan indikator pembangunan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Konreg PDRB-ISE Se-Sumatera Tahun 2023 dibuka secara langsung oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Rangkaian acara pembukaan diawali dengan persembahan tari selamat datang, kemudian Sambutan Tuan Rumah oleh Bupati Belitung, Laporan Ketua Tim Penyelenggara oleh Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Opening Speech* oleh Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI, Pembukaan serta Pemukulan Gong oleh Pj. Gubernur Kepulauan

Bangka Belitung, Persembahan Tari Mirah-Mirah Pinang, dan *Keynote Speech* oleh Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS RI. Setelah rangkaian acara pembukaan, agenda kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel dari beberapa pembicara nasional, yaitu Direktur Neraca Produksi BPS RI, Kepala Subdirektorat *Balance of Payments* Bappenas RI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara - Koordinator Bank Indonesia Wilayah Sumatera, dan Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan DJPb.



**d. Hasil yang Dicapai**

Konreg PDRB-ISE Se-Sumatera Tahun 2023 menghasilkan “PRAKARSA TANJUNG KELAYANG” yang terdiri atas Tujuh Kesepakatan dan Lima Rekomendasi sebagai berikut.

Kesepakatan

- 1) Kegiatan Konreg PDRB-ISE dan seluruh rekomendasi yang dihasilkan harus memberikan kontribusi nyata dalam menyediakan data statistik yang berkualitas serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk mewujudkan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- 2) Hasil Konreg PDRB-ISE ini dijadikan sebagai rekomendasi dalam pembahasan bidang sosial ekonomi pada Rapat Koordinasi Gubernur (RAKORGUB) se-Sumatera tahun 2023 guna meningkatkan sinergi dan konektivitas antar daerah. Untuk Selanjutnya Konreg PDRB-ISE dilaksanakan sebelum RAKORGUB.
- 3) Forum komunikasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik



- (Diskominfo) Provinsi, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi melaksanakan Diseminasi Kajian dan Data Regional secara rutin (minimal satu kali dalam setahun) untuk memberikan masukan dalam perencanaan dan percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- 4) Mengefektifkan sistem aplikasi Konreg PDRB-ISE wilayah Sumatera yang terkoneksi dengan portal Satu Data Provinsi Wilayah Sumatera sebagai media untuk melakukan forum komunikasi (*virtual discussion*), diseminasi data indikator sosial ekonomi dan monitoring pencapaiannya serta evaluasi kesepakatan yang telah dibuat antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Provinsi, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi. Penanggung jawab aplikasi adalah BPS Provinsi dan Diskominfo Provinsi yang akan menjadi tuan rumah Konreg PDRB-ISE selanjutnya.
  - 5) Masing-masing provinsi melakukan evaluasi implementasi kesepakatan Konreg PDRB-ISE wilayah Sumatera yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Provinsi, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi secara periodik, dan mengirim hasil evaluasi kesepakatan kepada Sekretariat Pelaksana Konreg PDRB-ISE se-Sumatera berikutnya (BPS Provinsi Jambi).
  - 6) Provinsi penyelenggara Konreg PDRB-ISE se-Sumatera berikutnya berperan sebagai Sekretariat Konreg dengan tugas:
    - a. Mempersiapkan rancangan kesepakatan;
    - b. Fasilitator tindak lanjut kesepakatan;
    - c. Menyusun tema Konreg PDRB-ISE dengan menyerap masukan dari provinsi lain serta sinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
    - d. Mengoptimalkan pelaksanaan poin 4; dan
    - e. Mempersiapkan perangkat rapat virtual *on-line* (zoom) dan streaming youtube semua kegiatan Konreg PDRB-ISE.
  - 7) Pelaksanaan Konreg PDRB-ISE tahun 2024 akan dilaksanakan di Provinsi Jambi dan Tahun 2025 akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.

### Rekomendasi

- 1) Penguatan kolaborasi penyediaan data dalam rangka kerja sama antar daerah wilayah Sumatera untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
- 2) Memanfaatkan forum komunikasi untuk memenuhi ketersediaan data pengendalian inflasi di wilayah Sumatera berupa data perkembangan harga, pasokan komoditas, stok, dan distribusi, serta penyusunan neraca pangan, untuk menjaga ketersediaan komoditas, stabilitas harga dan mengurangi disparitas harga.
- 3) Membentuk Forum Satu Data se-Sumatera yang bertugas untuk merancang ketersediaan data Ekonomi Kreatif, Statistik Pariwisata, Ekonomi Digital, Ekonomi Syariah, dan Ekonomi Lingkungan, termasuk di dalamnya Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, untuk merumuskan transformasi ekonomi dan mencari potensipotensi ekonomi baru.
- 4) Mendorong kolaborasi kebijakan dalam upaya penguatan koridor ekonomi wilayah Sumatera.
- 5) Mengusulkan adanya leading sector yang mengkoordinir perdagangan antar wilayah, yang di dalamnya termasuk pengelolaan data.

### **3. WORKSHOP KOORDINASI EKSPLORASI DAN PENYEDIAAN DATA UNTUK REBASING PDRB BERBASIS CVM PROVINSI JAMBI TAHUN 2023**

#### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 bertempat di Talang Jaya Room, Swiss-Belhotel Jambi.

#### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala BPS Provinsi Jambi, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Kepala BPKPD Provinsi Jambi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Kepala DPMPTPS Provinsi Jambi, Kepala Diskominfo Provinsi Jambi, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jambi, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi, dan Pimpinan Cabang Telkomsel Jambi.

#### **c. Rincian Kegiatan**

Dalam sambutannya, Kepala BPS Provinsi Jambi, Bapak Agus Sudibyo menyampaikan bahwa PDRB dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi. Terima kasih dan apresiasi setinggi – tingginya kepada Kementerian,

Lembaga, dan Asosiasi dalam menyediakan data untuk menghasilkan PDRB yang berkualitas. Rebasing atau perubahan tahun dasar adalah kegiatan yang harus dilakukan setiap 5-10 tahun sekali dengan rekomendasi United Nations (UN). Sehubungan dengan terjadinya Pandemi Covid-19, tahun 2020 tidak direkomendasikan UN untuk menjadi tahun dasar, sebaliknya digunakan metode CVM. Workshop Koordinasi Eksplorasi dan Penyediaan Data untuk Rebasing PDRB Berbasis CVM Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan langkah awal BPS untuk mengeksplorasi data yang tersedia oleh Kementerian, Lembaga, dan Asosiasi untuk penyusunan PDB dan PDRB.

CVM merupakan suatu set ukuran volume yang digunakan untuk mengukur estimasi harga konstan sehingga nilai pertumbuhan ekonomi akan ideal. Keunggulan CVM adalah datanya menjadi lebih akurat karena mengeliminasi bias, datanya selalu update karena pembandingnya adalah tahun lalu, dan disusun berbasis SUT berdasarkan tiga pendekatan secara langsung. CVM tidak terdapat unsur subjektivitas karena bobot atau tahun dasarnya berubah setiap tahunnya namun kekurangannya adalah implementasi yang sulit karena tahun dasar yang selalu berubah. Kekurangan dari *fix based* yaitu kurang mencerminkan struktur perekonomian terkini dan revisi pertumbuhan ekonomi cenderung besar sementara data yang dibutuhkan sangat rinci hanya pada saat penyusunan SUT.

Ekspor Jambi 59,16% merupakan komoditas sektor pertambangan, yang kemudian disusul oleh pengolahan dan pertanian. Keterlibatan masyarakat dalam sektor pertambangan sangat kecil, sehingga ini merupakan pertumbuhan yang belum berkualitas. Wilayah barat Jambi tetap menjadi zona konservasi meskipun juga terdapat pengembangan produksi, wilayah tengah Jambi merupakan zona produksi baik komoditas perkebunan maupun tanaman pangan, sedangkan wilayah timur Jambi difokuskan kepada peti kemas dan pelabuhan.



**d. Hasil yang Dicapai**

Dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan didapati bahwa metode PDRB yang sebelumnya menggunakan *fix based* akan berubah menggunakan metode CVM untuk meningkatkan akurasi PDRB. Dukungan yang diharapkan baik dari eksternal dan internal dalam penyediaan data yang lebih detil dan akurat akan

mendorong dalam mensukseskan perhitungan PDRB berbasis CVM. Konsep yang digunakan akan sama antara *subject matters* dan eksternal.

#### 4. FGD PERCEPATAN PROSES FASE INSENTIF BERBASIS KINERJA PROGRAM BIOCF ISFL PROVINSI JAMBI

##### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 bertempat di Ruang Tanah Pilih Pusako Betuah Bappeda Provinsi Jambi pukul 08.30 s.d. 10.30 WIB.

##### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan OJK Jambi, Direktur KLHK Jambi, dan Direktur BPD LH Jambi.

##### c. Rincian Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung implementasi Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang mengalami deforestasi tinggi sehingga saat ini, Provinsi Jambi berfokus pada upaya intervensi perubahan iklim. Laju deforestasi s.d. tahun 2021 adalah sebesar 19.757. Sampai dengan tahun 2025, Provinsi Jambi memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi CO<sub>2</sub> per tahun sebesar 17.387,746 Juta Ton.

Terdapat 3 pilar strategi pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi:

- a. Penggunaan tata guna lahan berkelanjutan pemulihan dan peningkatan produktivitas
- b. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan akses modal pembangunan dan mata pencaharian serta pemanfaatan jasa lingkungan
- c. Konektivitas dan Rantai Nilai Berkelanjutan



##### d. Hasil yang Dicapai

Dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan didapati bahwa Provinsi Jambi menjadi salah satu provinsi yang menerima hibah *BioCarbon Fund Inisiatif*

*Sustainable Forest Landscape* (BioCF-ISFL). Program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 dan direncanakan selesai pada tahun 2026. Pada tahun 2023, Provinsi Jambi memiliki tugas untuk menurunkan Emisi GRK sebesar 14 Juta Ton CO<sub>2</sub> ekuivalen agar bisa mendapatkan dana sebesar 70 Juta USD dari World Bank.

## 5. SEMINAR NASIONAL PENGURANGAN EMISI GRK DAN PELUANG PERDAGANGAN KARBON DI INDONESIA

### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari pada hari Senin dan Selasa tanggal 18-19 September 2023 bertempat di *Ballroom* Swiss-Belhotel Jambi.

### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Gubernur Jambi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan para pemangku kepentingan di Provinsi Jambi.

### c. Rincian Kegiatan

Seminar nasional pengurangan emisi GRK dan peluang perdagangan karbon di Indonesia merupakan sinergi dan kolaborasi OJK bersama beberapa Kementerian dan Lembaga terkait yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam hal penyelenggaraan Bursa Karbon secara komprehensif. Kegiatan seminar ini dilaksanakan pada lima kota di Indonesia, yakni Surabaya, Balikpapan, Makassar, Medan, dan Jambi.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan bahwa OJK sedang memfinalisasi Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang akan menjadi aturan pendukung dalam penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Sebelumnya, RPOJK tersebut telah dikonsultasikan bersama Komisi XI DPR-RI. Hal tersebut tentunya menjadi penyemangat dan meningkatkan rasa optimis untuk dapat menyelenggarakan perdagangan perdana unit karbon di bursa karbon pada bulan September sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden RI

Saat ini, pemerintah memiliki target menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 43,2 persen dengan bantuan partisipasi internasional pada 2030 sesuai dokumen Enhanced NDC 2022. Untuk itu, diperlukannya dukungan berbagai sektor dalam rangka upaya menurunkan GRK termasuk sektor Industri Jasa Keuangan.

Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam perdagangan karbon, salah satunya adalah pada subsektor pembangkit tenaga listrik yang Indonesia mempunyai 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara untuk dapat mengikuti perdagangan karbon tahun ini. Jumlah ini setara dengan 86 persen dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia. Adapun PLTU yang ikut dalam perdagangan karbon adalah PLTU di atas 100 Megawatt, dan

2024 di atas 50 Megawatt dan pada 2025 diharapkan seluruh PLTU dan PLTG akan masuk pasar karbon. Selain dari subsektor pembangkit, perdagangan karbon di Indonesia juga akan diramaikan oleh sektor lain yang akan bertransaksi di bursa karbon seperti sektor Kehutanan, Perkebunan, Migas, Industri Umum, dan lain sebagainya.

Untuk mendukung peluang itu, OJK juga akan terus memastikan perangkat infrastruktur tidak hanya fit tetapi juga lengkap mulai dari infrastruktur primer, sekunder dan pasar sehingga dapat menopang beroperasinya bursa karbon, serta mekanisme pengawasan yang sesuai untuk pasar karbon agar selaras dengan target nasional yang ditetapkan dalam *Nationally Determined Contribution (NDC)*.



**d. Hasil yang Dicapai**

Dari hasil paparan dan diskusi pada acara tersebut, diharapkan terdapat peningkatan pemahaman masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait peranan setiap lembaga yang terlibat dalam ekosistem perdagangan karbon, termasuk peranan regulator, pengembang proyek, konsultan, lembaga akreditasi, lembaga validasi/verifikasi, akademisi, dan juga pihak lainnya sehingga bursa karbon Indonesia dapat menjadi bursa karbon yang terpercaya, terbesar dan berkontribusi bukan hanya untuk kepentingan nasional tetapi juga kontribusi terhadap program pengurangan emisi GRK secara global.

**6. SOSIALISASI KEGIATAN PROGRAM CLUA FOR SOCIAL FORESTRY DI WILAYAH JAMBI**

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari pada Selasa tanggal 19 September 2023 bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Direktur BPD LH dan para pemangku kepentingan di Provinsi Jambi.

**c. Rincian Kegiatan**

Sosialisasi dilakukan oleh BPDFH kepada DLH Provinsi Jambi dengan maksud untuk memberikan pemahan terkait dengan Program Climate and Land Use Alliance (CLUA) atau Aliansi Perubahan Iklim dan Tata Guna Lahan. Program ini berupaya untuk mewujudkan potensi mitigasi perubahan iklim dalam sektor hutan dan pemanfaatan lahan agar bermanfaat bagi manusia dan melindungi lingkungan.

Provinsi Jambi terpilih sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang akan mendapatkan dana dari para donator terkait dengan program CLUA ini. Adapun pemilihan tersebut didasarkan oleh banyaknya lahan gambut di Provinsi Jambi.

Program CLUA bertujuan untuk mengurangi emisi dari hutan dan lahan gambut di Indonesia yang melindungi hak masyarakat lokal atas tanah, meningkatkan penghidupan lokal, dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Program CLUA mendukung empat area, meliputi:

- 1) Pengembangan Kebijakan Rendah Emisi  
Mendukung kebijakan penggunaan lahan, baik secara nasional maupun sub nasional, yang berkontribusi terhadap iklim Indonesia dan sasaran pembangunan.
- 2) Melindungi Hak Masyarakat atas tanah  
Menjamin perluasan dan penguatan hak masyarakat atas tanah dan sumber daya hutan untuk mendukung perekonomian pedesaan yang rendah emisi.
- 3) Produksi Komoditas Berkelanjutan  
Menghilangkan deforestasi, perluasan lahan gambut, dan eksploitasi masyarakat dari kelapa sawit serta rantai pasok pulp dan kertas.
- 4) Mempromosikan Keadilan dan Pembangunan Berkelanjutan  
Mendorong diskusi di bidang sosial dan manfaat lingkungan dari pembangunan yang adil dan rendah emisi dengan tetap menghargai hutan dan lahan gambut.



**d. Hasil yang Dicapai**

Dari hasil paparan dan diskusi pada acara tersebut, diharapkan terdapat peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan, khususnya pada Dinas



Lingkungan Hidup, tentang pentingnya Program CLUA dalam rangka perlindungan hak masyarakat lokal atas tanah, peningkatan penghidupan lokal, dan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.



# **PELAKSANAAN KEGIATAN LOCAL EXPERT**

**FKPKN TRIWULAN III TAHUN 2023**



## PELAKSANAAN KEGIATAN *LOCAL EXPERT*

### 1. RAPAT KOMITE ALCO REGIONAL JAMBI REALISASI S.D. JUNI 2023

#### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 pukul 08.30 s.d. 15.00 WIB bertempat di Aula KPPN Jambi dan secara daring melalui Teams Meeting.

#### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dihadiri oleh Kemenkeu SATU Provinsi Jambi, Eselon I Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik dan *Local Expert* dari UNJA.

#### c. Rincian Kegiatan

Kegiatan Rapat Komite ALCo Regional bertujuan menyampaikan *highlights* dan amplifikasi hasil rapat ALCo Pusat oleh pimpinan unit eselon I (dalam hal ini diwakili oleh Direktur PPKBLU DJPb) yang dilanjutkan dengan pemaparan oleh *local expert* terkait *local economic development*, penyampaian informasi kinerja APBN dan APBD oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, paparan joint penerimaan, dan sinergi UMKM oleh para koordinator pokja, serta tanggapan dari para peserta yang hadir.



#### d. Hasil yang Dicapai

Dari hasil Rapat Komite ALCo Regional realisasi s.d. 30 Juni 2023 yang telah dilaksanakan, dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut:

- 1) Mendorong KPP dan Pemda bersinergi untuk melakukan penguatan basis data dengan melakukan penilaian kembali atas objek pajak bumi dan bangunan.
- 2) Mendorong Pemda untuk dapat bersinergi dengan instansi terkait (termasuk KPKNL) dalam upaya penagihan utang pajak/retribusi.
- 3) Mendorong penguatan SDM Pemda terkait pengelolaan PAD melalui serangkaian pelatihan yang dapat didukung oleh BDK Pekanbaru.
- 4) Mendorong sinergi Pemda bersama DJP untuk fasilitasi penguatan tugas dan fungsi petugas pajak khususnya juru sita dan penilai.
- 5) Mendorong Pemda untuk melakukan otomatisasi pemungutan dan perhitungan/penetapan PDRD, dan mendorong Pemerintah Pusat untuk melakukan analisis efektivitas biaya investasi modernisasi PDRD untuk mengetahui opsi yang paling efektif apakah modernisasi (aplikasi) dibangun oleh masing-masing Pemda atau oleh Pemerintah Pusat untuk seluruh Pemda.
- 6) Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Kepala OJK memberi masukan untuk dibentuk Jamkrida atau perusahaan asuransi daerah yang apabila dikelola dengan baik dan benar dapat meningkatkan pendapatan daerah.
- 7) OJK memiliki data terkait dengan pinjaman motor dan bersedia menyediakan data untuk analisis lebih lanjut terkait kolaborasi peningkatan pendapatan dari kendaraan bermotor. OJK juga dapat membantu dalam memfasilitasi penerbitan obligasi dari perbankan ke pemerintah daerah.
- 8) Perwakilan Universitas Islam Negeri Jambi dan Perwakilan Bank Indonesia memberi masukan agar pemerintah lebih memperhatikan petani karet dan menjadikan kembali komoditas karet menjadi produk unggulan Provinsi Jambi karena akan berdampak pada kejernihan air dan sungai.
- 9) Untuk komoditas kayu manis dan kopi, BI dan OJK dapat berkolaborasi dengan Kemenkeu Satu untuk mendukung produktivitas kedua produk ini.
- 10) Dalam upaya memberikan pelayanan terbaik, seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus menjaga integritas serta tidak menerima pemberian atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

## **2. *SHARING SESSION* ANALISIS KETIMPANGAN FISKAL (HORIZONTAL DAN VERTIKAL) DI PROVINSI JAMBI BERSAMA *LOCAL EXPERT***

### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 pukul 09.30 s.d. 12.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Kanwil DJPb Jambi.

### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan dihadiri oleh seluruh pejabat/pegawai Bidang PPA II dan perwakilan 1 (satu) pejabat pengawas dan 1 (satu) pegawai pada bagian/bidang Kanwil DJPb

Provinsi Jambi dengan menghadirkan narasumber *local expert* Jambi yaitu Dr. Drs Zulgani, MP, Lektor Kepala pada Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

### c. Rincian Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan forum kolaborasi dan *sharing knowledge* sekaligus memanfaatkan *local expert* sebagai mentor dalam meningkatkan kapasitas SDM Kanwil DJPb dalam melaksanakan berbagai penugasan di bidang fiskal, khususnya dalam penyusunan bahan dan analisis ALCo Regional.

Agenda dibuka oleh Kepala Seksi PPA II B, Bapak Bernand Situmorang, kemudian dimoderatori oleh Kepala Bidang PPA II, Bapak Fauzi Syafriel dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Zulgani terkait ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal.



### d. Hasil yang Dicapai

Dari hasil kegiatan *sharing session* yang telah dilaksanakan, dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut:

- 1) Perhitungan yang dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Jambi untuk analisis ketimpangan fiskal vertikal akan semakin lengkap apabila disertai analisis serta



bagaimana implementasi hasil perhitungan tersebut untuk merumuskan kebijakan yang bermanfaat bagi Provinsi Jambi.

- 2) Rekomendasi yang dapat diberikan adalah mendorong terbentuknya hilirisasi penguatan sektor pertambangan. Tujuannya meningkatkan PAD melalui penguatan *local taxing power*, menciptakan respon kerja, dan menambah pendapatan.
- 3) Perlu dilakukan pendalaman rumusan dana transfer versi UU Nomor 34 tahun 2004 dan versi UU Nomor 1 Tahun 2022. Versi UU Nomor 1 sudah diimplementasikan sebagian pada tahun 2023 dan diharapkan ditindaklanjuti apakah DBH dapat mengurangi *vertical imbalances* serta dampak DAU terhadap *horizontal imbalances*.
- 4) Evaluasi dapat dilakukan pada bagaimana aktivitas perekonomian dapat merangsang ketahanan ekonomi daerah baik dari sisi kapasitas fiskal pemerintah daerah, maupun dari sisi kemampuan pemerintah daerah dalam mencukupi layanan publik minimal (akses sanitasi, air bersih, pendidikan, dll).
- 5) Kunci utama dari peningkatan local taxing adalah visi dari pemimpin. Visi pimpinan politik dan pimpinan unit yang melayani PAD. Cara mengidentifikasi tidak bisa dari sisi fiskal namun juga sisi sosial.
- 6) Diharapkan dapat membandingkan pergerakan alokasi DBH yang ditetapkan dengan pertumbuhan PDRB pada KLU yang bersesuaian dengan DBH tersebut (misal DBH SDA dengan PDRB pertambangan dan migas; DBH perkebunan dengan PDRB perkebunan, kehutanan). DBH Sawit juga sudah ditetapkan dan akan menjadi tambahan perhitungan untuk mengurangi *vertical imbalances*.
- 7) UU HKPD perlu disosialisasikan kepada mahasiswa baru melalui kuliah umum.



# **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

**FKPKN TRIWULAN III TAHUN 2023**

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### KESIMPULAN

1. Dalam rangka meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN, APBD, dan TKD, telah dilaksanakan edukasi terhadap Satuan Kerja maupun OPD terkait secara berkelanjutan melalui pembinaan, sosialisasi, dan rapat koordinasi baik dari sisi perencanaan hingga pelaporan keuangan negara mengingat perubahan peraturan yang sangat dinamis.
2. Sebagai upaya penguatan koridor ekonomi wilayah Sumatera, Kanwil DJPb Provinsi Jambi terlibat secara aktif dalam kegiatan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto Indikator Sosial Ekonomi se-Sumatera Tahun 2023 yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk keserasian informasi berbagai aspek terkait dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional wilayah Sumatera sehingga menghasilkan Prakarsa Tanjung Kelayang.
3. Dalam rangka mendukung implementasi Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Jambi dan sebagai salah satu provinsi yang menerima hibah *BioCarbon Fund Initiative Sustainable Forest Landscape (BioCF-ISFL)*, dilaksanakan kegiatan FGD Percepatan Proses Fase Insentif Berbasis Kinerja Program BioCF ISFL Provinsi Jambi yang juga melibatkan Bappeda, Sekretariat Program BioCF ISFL Provinsi Jambi, dan OJK Jambi.
4. Demi mendukung pemberdayaan serta penguatan peran UMKM terhadap perekonomian Provinsi Jambi, Kanwil DJPb Provinsi Jambi bersama dengan BLU PIP melaksanakan sosialisasi dalam rangka penambahan calon penyaluran UMi yaitu Koperasi.
5. Untuk melaksanakan langkah – langkah strategis perbaikan nilai IKPA dalam kinerja pelaksanaan anggaran, Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan melibatkan seluruh satker dinas dalam wilayah Provinsi Jambi menyelenggarakan FGD Pelaksanaan Anggaran yang menyampaikan peningkatan kualitas perencanaan anggaran, peningkatan kedisiplinan pelaksanaan kegiatan satuan kerja, akselerasi pelaksanaan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan KKP, efisiensi dan efektivitas belanja, penetapan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit, serta penerapan strategi pelaporan target dan realisasi capaian output.
6. ALCo atau *Asset and Liabilities Committee* Regional merupakan struktur di tingkat provinsi yang memiliki hubungan kerja serta memiliki peran untuk mendukung ALCo di tingkat Pusat melalui penyajian data dan informasi yang bersifat regional seperti informasi terkait APBN, APBD, Perpajakan, Bea Cukai dan Kekayaan Negara lingkup wilayah Provinsi Jambi yang menggambarkan kondisi perekonomian di Provinsi Jambi.

7. Sebagai upaya mewujudkan penguatan dan kerja sama dengan pihak eksternal seperti akademisi, pimpinan daerah, dan profesional di bidang ekonomi dan keuangan negara di wilayah Provinsi Jambi, Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah mensinergikan FKPKN dengan TPID, TP2DD, TPPS, dan berpartisipasi dalam keterlibatan berbagai forum di daerah seperti *One on One Meeting* Pengendalian Inflasi Lingkup Provinsi Jambi.

## REKOMENDASI

1. Melaksanakan monitoring dan pendampingan penyusunan laporan keuangan secara rutin triwulanan. Monitoring berupa hal-hal yang harus dilakukan oleh satker untuk akuntansi dan pelaporan keuangan dan kendala-kendala yang dihadapi agar segera dapat diberikan saran dan masukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara daring agar semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dapat mengikuti kegiatan dengan fleksibel dan tidak terbatas pada satuan kerja vertikal tetapi pada Pemerintah Daerah termasuk Badan Layanan Umum Daerah.
2. Membentuk forum satu data se-Sumatera dan memanfaatkan forum komunikasi untuk memenuhi ketersediaan data pengendalian inflasi di wilayah Sumatera seta mendorong kolaborasi kebijakan dalam upaya penguatan koridor ekonomi wilayah Sumatera.
3. Meningkatkan komunikasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan ALCo Regional baik Kemenkeu Satu, Pemerintah Daerah, *local expert* dan instansi lainnya. Hal ini bertujuan agar informasi dapat tersampaikan secara cepat dan tepat sehingga ALCo Regional yang disusun menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi.
4. Membangun dan meningkatkan komunikasi dua arah dengan Pemerintah Daerah. Bagi Kanwil DJPb Provinsi Jambi, hal ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD termasuk dana TKD. Bagi Pemerintah Daerah, hal ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Selain itu, baik Kanwil DJPb dan Pemerintah dapat lebih aktif dalam melakukan pertukaran data untuk kepentingan analisis yang berguna bagi peningkatan pengelolaan keuangan negara.
5. Membangun komunikasi dengan satker pusat yang berada di wilayah Jambi. Hal ini bertujuan agar Kanwil DJPb Provinsi Jambi mengetahui kendala yang dihadapi satker dalam penyaluran APBN, pengelolaan keuangan dan optimalisasi nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) satker. Bagi satker, hal ini perlu karena bisa mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan terkait penyaluran APBN, pengelolaan keuangan dan mengoptimalkan nilai IKPA.



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI**